

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL**

(Studi di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto)

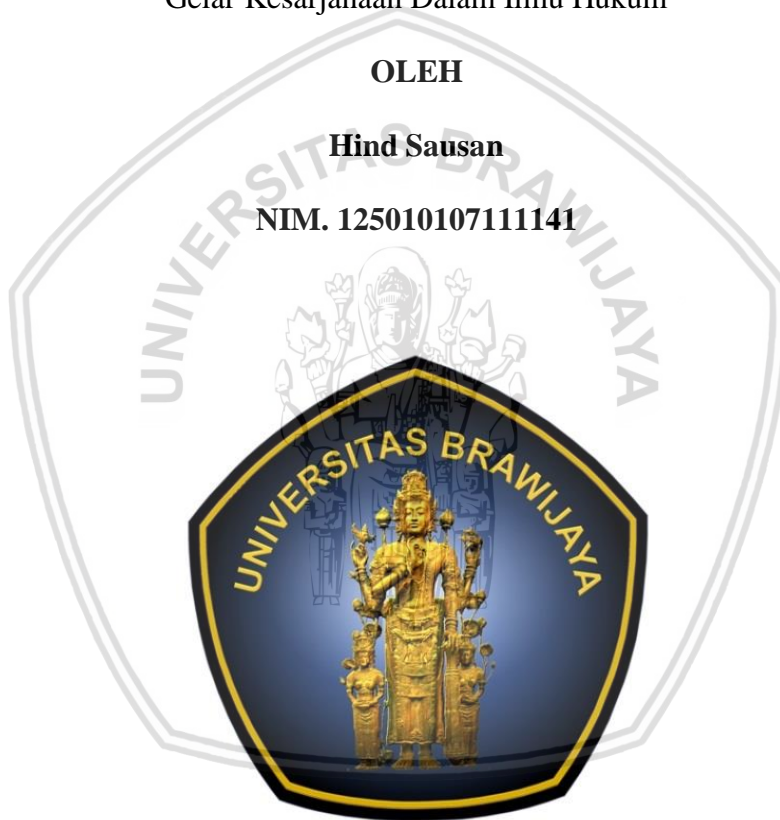
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

OLEH

Hind Sausan

NIM. 125010107111141



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto)

Identitas Penulis :

a. Nama : Hind Sausan

b. NIM : 125010107111141

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian : 7 bulan

Disetujui pada tanggal:

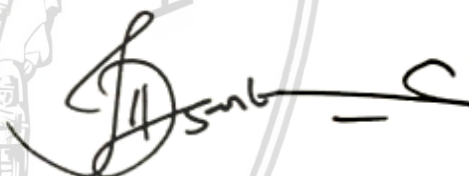
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Lutfi Effendi, SH.MH.

NIP. 196008101986011002



Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH.

NIP. 197703052009122001

Mengetahui,
Kepala Bagian
Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, SH.MH.

NIP. 196008101986011002

HALAMAN PENGESAHAN

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERDAGANGAN

MINUMAN BERALKOHOL (Studi di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman

Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Mojokerto)

Oleh

HIND SAUSAN

12501010111141

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

20 MAR 2018

Ketua Majelis Penguji

Anggota Majelis Penguji





Lutfi Effendi, SH.MH.

Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH.

NIP. 196008101986011002

NIP. 197703052009122001

Mengetahui,

Kepala Bagian

Dekan Fakultas Hukum

Hukum Administrasi Negara




Lutfi Effendi, SH.MH.

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.

NIP. 196008101986011002

NIP. 19620805198821001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih karunia yang tiada henti. Tanpa bantuan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan lancar. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, baik berupa saran maupun kritik yang membangun, diantaranya:

1. Kedua Orang Tua, kedua Kakak dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran proses penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Rachmad Safa'at S.H.,MSi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini.
3. Bapak Lutfi Effendi SH.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum Administrasi Negara dan juga selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis selama proses pengerjaan Skripsi ini.
4. Dr. Shinta Hadiyantina,SH.MH., selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing penulis dalam proses pengerjaan Skripsi ini.
5. Nadia Siti Nur Azizah, Yuvi Yuni Riswanti, Agitya Windya Putri, Intan Agustina, Umi Azizah, I Gusti Bayu Permana, dan Moch. Adam Alliyansyah yang selalu menjadi sahabat-sahabat terbaik saya dan selalu mendukung saya dalam proses pengerjaan Skripsi ini.

6. Rachmadea Aisyah, Fadhillah Nugrahani, Falaqie Hikari, dan Shabrina Teruri sebagai sahabat satu kos saya yang selalu memberikan dukungan dalam pengerjaan Skripsi ini.
7. Alumni kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Pandaan yang selalu memberikan dukungan dalam proses pengerjaan Skripsi ini.
8. De'Hans sebagai teman seperjuangan saya yang menemani berjuang bersama dalam pengerjaan Skripsi ini.
9. Pihak-pihak lain yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh dalam pengerjaan sehingga Skripsi dapat terselesaikan dengan baik oleh penulis.

Penulis yakin Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki Skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Bagan	viii
Abstraksi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Perizinan.....	14
B. Kajian Umum Mengenai Teori Pengawasan.....	25
C. Kajian Umum Mengenai Minuman Beralkohol.....	29
D. Kajian Umum Mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/Hum/2012 tentang Pembatalan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997.....	30
E. Kajian Umum Mengenai Peraturan Presiden Nomo 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.....	30
F. Kajian Umum Mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penagwasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Memperoleh Data	35
F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Definisi Operasional.....	37
I. Sistematika Penulisan.....	38

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto	
1. Letak Geografis Kabupaten Mojokerto.....	41
2. Keadaan Sosial Ekonomi Kabupaten Mojokerto	42
3. Gambaran Umum Badan Perjinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto	44
4. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.....	61
5. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.....	91
B. Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto, serta Satuan Polisi Pamong Praja terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	95
C. Hambatan-hambatan yang dialami dalam upaya pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	127

D. Solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam upaya pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	130
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran.....	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Mengenai Peredaran Minuman Beralkohol	5
Tabel 2. Pendapatan Regional Per Kapita Penduduk Kabupaten Mojokerto.....	42
Tabel 3.Data Izin kafe dan karaoke yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokertoperiode 2010-2014	116
Tabel 4. Daftar Karaoke di Kabupaten Mojokerto.....	120



DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman

Modal Kabupaten Mojokerto 59

Bagan 2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Mojokerto..... 89

Bagan 3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Mojokerto..... 93



RINGKASAN

Hind Sausan, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2016, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI DI BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO), Lutfi Effendi, SH., M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pengendalian dan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi sejak pembatalan Keputusan Presiden nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Kabupaten Mojokerto hingga saat ini masih belum mempunyai payung hukum tentang peredaran minuman beralkohol.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto, serta Satuan Polisi Pamong Praja terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol? (2) Apa saja hambatan yang dialami dalam upaya pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol? (3) Apa saja solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam upaya pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan metode kualitatif. Jenis data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknis analisis kualitatif naturalistik yaitu suatu metode analisis data dengan cara melakukan pengamatan secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, serta menekankan pada deskripsi secara alami.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa selama belum ada peraturan daerah mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol dari dua (2) segi, yaitu dari segi *preventif* dan juga dari segi *represif*. Pengawasan dan pengendalian dari segi *preventif* adalah berupa kegiatan sosialisasi ke masyarakat bahwa untuk sementara izin usaha perdagangan

minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto belum bisa diterbitkan. Pengendalian dan pengawasan dari segi *represif* adalah berupa kegiatan inspeksi mendadak ke kafe dan karaoke di Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dan pihak legislatif disarankan untuk segera bekerjasama menyusun Peraturan Daerah tentang pengaturan pengendalian dan pengawasan izin usaha minuman beralkohol agar dapat secepatnya diterbitkan.



SUMARRY

Hind Sausan, State Administrative Law Faculty of Law, Brawijaya University Malang, June 2016, Control and Monitoring Alcoholic Trading Business Permit (Study in Department of Lincensing Integrated and Investment, Department of Industry and Trade and Office Civil Service Police Unit District Mojokerto), Lutfi Effendi, SH., M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH.

The purpose of this research is to understand, examine, and analyze the controlling and supervising process by Department of Industry and Trade of Kabupaten Mojokerto, Integrated Licensing and Capital Ivestment Agency of Kabupaten Mojokerto, and Pamong Praja Police Force toward the permission for liquor trade, in relation with Provincial Regulation of Kabupaten Mojokerto regarding the Supervision and Control of Liquors.

This is an empirical research using sociologic jurisdictional approach with descriptive method, with inductive reasoning pattern for analyzing. The nature of the data is primary and secondary, obtained by author through interview, direct and indirect observation, literature study, all analyzed through naturalistic qualitative method.

The result of this research shows that the provincial government of Kabupaten Mojokerto has not been able to proceed with the establishment of Commercial Licence for Liquor Trade (SITU-MB) as long as there are no provincial regulation that arrange the Supervision and Control of Liquors in Kabupaten Mojokerto. So, as long as there are no provincial regulation for this, the Government of Kabupaten Mojokerto controls and supervises the licensing for liquor commercialization based on Presidential Ordinance of Minister of Industry No. 20/2014 regarding the Cobtrol and Supervision of Procurement, Circulation, and Sale of Liquors.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Adapun yang disebut dengan minuman beralkohol tradisional, minuman ini dibuat secara tradisional dengan metode turun-menurun yang dikemas secara sederhana dan dapat dibuat sewaktu-waktu tergantung kebutuhan. Biasanya minuman beralkohol tradisional ini digunakan untuk kebutuhan acara adat-istiadat atau upacara keagamaan.¹ Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Dibanyak negara minuman beralkohol sangat dibatasi penjualannya, biasanya minuman beralkohol hanya boleh diperjual belikan ke sejumlah orang yang telah melewati batas usia tertentu saja. Konsumsi alkohol secara berlebihan bisa menimbulkan efek samping berupa gangguan mental yaitu, suatu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Di Indonesia, minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh Negara.

Pengawasan peredaran Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor di Indonesia tidak hanya dilakukan

¹ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

oleh Pemerintah Pusat, namun juga oleh Pemerintah Daerah. Mengingat efek negatif yang ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi Minuman Beralkohol tersebut. Ada 3 golongan minuman keras beralkohol di Indonesia yaitu, golongan A dengan kadar alkohol kurang atau sama dengan 5 persen, golongan B dengan kadar alkohol 5-20 persen, dan golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20 persen.² Minuman beralkohol tersebut ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Sejak adanya pembatalan Keputusan Presiden nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Kabupaten Mojokerto hingga saat ini masih dalam tahap penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Sehingga sampai saat ini di Kabupaten Mojokerto masih belum mempunyai payung hukum tentang peredaran minuman beralkohol.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui *leading sector* Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto saat ini tengah membentuk tim penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol diantara lain:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto selaku ketua tim;
2. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto sebagai anggota;

² Jurnal Nasional, Minuman Beralkohol Pakai Label SNI (Online), <http://www.kemenperin.go.id/artikel/8338/Minuman-Alkohol-Pakai-Label-SNI> (10 November 2015).

3. Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto sebagai anggota;
4. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto sebagai anggota;
5. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota;
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai anggota;
7. Bagian Perekonomian Kabupaten Mojokerto sebagai anggota.

Sejauh ini rancangan peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol telah sampai pada tahap pembahasan di tingkat DPRD Kabupaten Mojokerto. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan studi di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto, di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto serta di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.

Hal ini disebabkan karena Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto merupakan ketua Tim Pembentukan Peraturan Minuman Beralkohol Kabupaten Mojokerto, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran penting selaku pemberi rekomendasi atas pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dapat dikeluarkan atau tidak. Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai petugas penegak Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan

pengendalian perdagangan minuman beralkohol agar sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Ketiga instansi tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol, dengan tanpa mengesampingkan peranan dari instansi-instansi lainnya.



Tabel 1.1

Daftar Penelitian Mengenai Peredaran Minuman Beralkohol

No.	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2014	I Komang Yogi Triana Putra Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Label Edar (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali).	1. Bagaimana upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa label edar? 2. Apa kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam penegakan hukum terhadap	Penelitian ilmiah ini mengkaji tentang penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa label edar di provinsi Bali.

				peredaran minuman beralkohol tanpa label edar?	
				3.	
2.	2014	Ayu Bimo Setyo Putri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Sinergitas Tim Terpadu Dan Kepolisian Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Minimarket Kota Malang (Sinergitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9	1. Bagaimanakah bentuk sinergi yang dilakukan oleh tim terpadu dan kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket Kota Malang? 2. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan tim terpadu dan kepolisian untuk memaksimalkan sinergi dalam rangka mengontrol peredaran minuman beralkohol di	Penelitian ilmiah ini mengkaji tentang Sinergitas Tim Terpadu Dan Kepolisian Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Minimarket Kota Malang.

			Tahun 2009).	<p>minimarket Kota Malang?</p> <p>3. Mengapa terjadi penyimpangan pada Pasal 15 PERDA Kota Mlang Nomor 5 Tahun 2006, dan apa kendala yang dihadapi oleh Tim Terpadu serta Kepolisian dalam pengawasannya di minimarket Kota Malang?</p>	
3.	2015	<p>Cynthia</p> <p>Grahady Puteri</p> <p>Fakultas Hukum</p> <p>Universitas</p> <p>Brawijaya</p>	<p>Optimalisasi Pengawasan Pemerintah Terhadap Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kios-Kios Di Kota Malang (Studi di Dinas</p>	<p>4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengontrol pelaksanaan ijin tempat penjualan minuman</p>	<p>Penelitian ilmiah ini mengkaji tentang optimalisasi pengawasan pemerintah terhadap ijin usaha perdagangan minuman beralkohol di kios-kios yang terdapat di Kota Malang.</p>

			Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja).	beralkohol di Kios-kios di Kota Malang? 5. Apa saja hambatan terhadap pengawasan ijin tempat penjualan minuman beralkohol dan bagaimana optimalisasi dalam pengawasan izin minuman beralkohol di Kota Malang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006?	
--	--	--	--	--	--

Sumber: *Data Sekunder, diolah 2016*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto, serta Satuan Polisi Pamong Praja terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol?
2. Apa saja hambatan yang dialami dalam upaya pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol?
3. Apa saja solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam upaya pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto, serta Satuan Polisi Pamong Praja terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

2. Mengetahui, mengkaji dan menganalisis hambatan yang dialami dalam upaya pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
3. Mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam upaya pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui pengumpulan dan pengkajian informasi dari berbagai sumber yang dilakukan nantinya dapat membantu proses berkembangnya ilmu pengetahuan pada disiplin ilmu hukum Administrasi Negara, khususnya hukum perizinan. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk menunjang proses belajar bagi civitas akademika khususnya di fakultas hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan yang dapat memberikan pemikiran bagi pemerintah daerah untuk dijadikan referensi atau gambaran dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol di daerah.

b. Bagi Pengusaha

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai hak-hak, kewajiban, dan prosedur yang dapat di tempuh dalam proses perizinan tempat usaha minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi luas bagi masyarakat terkait dengan hukum, pengawasan, dan pengendalian perizinan tempat usaha minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penulisan yang terstruktur, maka dalam penelitian ini menggunakan format penulisan penelitian sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori-teori tersebut akan dipakai dalam menganalisis

permasalahan dalam penelitian, yang meliputi tinjauan tentang minuman beralkohol, tinjauan tentang teori pengawasan, tinjauan tentang perizinan, tinjauan tentang Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, tinjauan tentang Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan tinjauan tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, serta definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan metode penelitian yang digunakan, sehingga dapat terjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengendalian dan pengawasan izin tempat usaha perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari bab-bab sebelumnya dengan menemukan garis besar pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sedangkan saran diperoleh berdasarkan ketidaksesuaian antara aturan dengan teori yang ideal. Selanjutnya dari saran ini dapat memicu kinerja pihak-pihak yang berkepentingan

menjadi lebih baik lagi khususnya dalam hal pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan dapat berguna bagi semua pihak yang membaca.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perizinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb); persetujuan membolehkan.¹ Adapun pengertian lain dari izin, yaitu adalah sebagai perbuatan hukum bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dengan yang diberi konsesi atau penerima konsesi.²

N.M Spelt dan J.B.J ten Berge membagi izin dalam arti luas dan sempit. Izin dalam arti luas adalah ketika penguasa memperbolehkan orang yang memohon untuk diperkenankan melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Sedangkan izin dalam arti sempit adalah berarti pengikatan atau suatu tindakan pengendalian dengan menggunakan instrumen peraturan izin yang biasanya didasarkan pada keinginan pembuat Undang-undang semata untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghindari keadaan-keadaan yang tidak baik yang mungkin sedang terjadi atau akan terjadi dikemudian hari.³

Adapun pengertian izin menurut Utrecht. Utrecht berpendapat bahwa izin adalah keadaan dimana ketika pembuat suatu peraturan tidak memperkenankan suatu tindakan tertentu, tetapi tetap saja memperkenalkan tindakan tersebut kepada masyarakat namun diiringi dengan aturan-aturan

¹ KBBI versi Online (2 Januari 2016)

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 209.

³ *Ibid*

yang ditentukan, maka hal tersebut bisa dikatakan bersifat suatu izin (*vergunning*).⁴

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/ badan tata usaha yang berwenang, yang substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:⁵

1. Izin bersifat bebas, maksudnya adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki tingkat kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat, maksudnya adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin tingkat kebebasan dan wewenangnya tergantung pada tingkat sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal apakah izin bisa ditarik kembali/ dicabut atau tidak. Pada dasarnya hanya izin sebagai keputusan TUN yang bebas yang dapat ditarik kembali/ dicabut, hal itu karena tidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat. Pada izin yang bersifat terikat, pembuat undang-undang memformulasikan syarat-syarat di mana izin dapat diberikan dan izin dapat ditarik kembali/ dicabut.
3. Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Maksudnya yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Contohnya adalah seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan lain-lain.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, 2011, hlm 167.

⁵*Ibid*

4. Izin yang bersifat memberatkan, maksudnya adalah izin yang substansinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Contohnya, adalah pemberian izin kepada perusahaan tertentu. Bagi mereka yang tinggal di sekitarnya akan merasa di rugikan dan menjadi beban. Hal itu bisa dikarenakan banyak hal, misalnya seperti alasan pencemaran lingkungan, alasan keamanan, dan sebagainya.
5. Izin yang segera berakhir, maksudnya adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, contohnya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang hanya berlaku ketika mendirikan bangunan dan berakhir ketika bangunan telah selesai didirikan.
6. Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, contohnya seperti izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
7. Izin yang bersifat pribadi, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Contohnya seperti Surat Izin Mengemudi (SIM).
8. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin. Contohnya seperti izin Gangguan (HO), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan sebagainya.

Adapun beberapa unsur dari perizinan, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Wewenang

Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh

⁶*Op. cit.*, Ridwan HR, hlm 210.

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar keputusan yuridis yang dibuat dapat bersifat konkret.

2. Izin Sebagai Bentuk Ketetapan

Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai kini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis, yaitu dalam bentuk ketetapan. Ketetapan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sebagai norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan adalah izin. Izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu.

3. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah adalah lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari Administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan Administrasi Negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin.

4. Peristiwa Konkret

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan. Izin digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual, yang artinya adalah

suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.

5. Proses dan Prosedur

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh petugas.

6. Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan izin. Persyaratan tersebut biasanya berupa kelengkapan dokumen atau surat-surat tertentu. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif karena ditentukan oleh suatu perbuatan atau tingkah laku yang harus dipenuhi terlebih dahulu, artinya di tentukan oleh suatu perbuatan konkret dan bila tidak dipenuhi maka akan dikenai sanksi. Bersifat kondisional karena penilaian baru muncul dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan yang disyaratkan telah terjadi.

7. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi terkait. Durasi waktu sangat berkaitan dengan proses perizinan, karena adanya tata cara dan prosedur yang harus ditempuh pemohon izin dalam mengajukan permohonan. Maka dari itu, regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Disebutkan dengan jelas;
- b. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin;
- c. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

8. Biaya Perizinan

Pembiayaan merupakan hal mendasar pada pengurusan perizinan. Namun, pembiayaan sesungguhnya bukan merupakan alat *budgetaire* negara. Oleh karena itu, pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Disebutkan dengan jelas;
- b. Mengikuti standar Nasional;
- c. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek dan syarat tertentu;
- d. Perhitungan didasarkan pada *real cost* (biaya yang sesungguhnya);
- e. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

9. Pengawasan Penyelenggaraan Izin

Dalam banyak hal memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan perizinan pemerintah masih kurang baik. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan;
- b. Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan;
- c. Budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan;
- d. Budaya paternalistik yang masih tinggi, artinya aparatur masih menempatkan atasan/ pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

Untuk menerapkan prinsip-prinsip pelayanan yang baik maka harus didampingi dengan dukungan pembuatan kebijakan. Salah satu kebijakan yang dibentuk adalah dengan melaksanakan kebijakan Pengawasan Melekat di seluruh unit kerja pemerintah. Pengawasan Melekat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan atasan langsung

terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan internal bisa melalui atasan langsung dan pengawas fungsional, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan melalui pengawasan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

10. Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa

Setiap pimpinan unit penyelenggara pelayanan perizinan wajib menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan izin sesuai kewenangannya. Untuk menampung pengaduan masyarakat tersebut, unit pelayanan perizinan harus menyediakan loket/ kotak pengaduan dan berbagai sarana pengaduan lainnya dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat.

Untuk dapat menjadikan pengaduan sebagai sumber perbaikan pelayanan perizinan, maka pengaduan itu sendiri harus dikelola dengan baik dan benar dengan melalui mekanisme penanganan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penentuan prioritas pengaduan yang masuk ke loket/ kotak pengaduan dan berbagai sarana pengaduan lainnya;
- b. Adanya prosedur penyelesaian pengaduan;
- c. Adanya pejabat/ petugas yang secara khusus bertanggung jawab atas pengaduan;
- d. Adanya standar waktu penyelesaian pengaduan.
- e. Apabila penyelesaian pengaduan tersebut oleh pemohon atau pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya izin, maka hal tersebut merupakan suatu

sengketa. Sehingga dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum, yakni melalui mediasi, Ombudsman, atau ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perizinan tersebut.

11. Sanksi

Sebagai produk kebijakan publik, maka regulasi dan deregulasi perizinan harus memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Disebutkan secara jelas terkait dengan unsur-unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan;
- b. Penyebutan jangka waktu pengenaan sanksi;
- c. Mekanisme pengguguran sanksi.

12. Hak dan Kewajiban

Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah dikemukakan mengenai hak dan kewajiban masyarakat (pemohon izin) dan instansi pemberi pelayanan perizinan.

Hak-hak masyarakat, antara lain:

- a. Mendapatkan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
- b. Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
- c. Mendapatkan tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak;
- d. Mendapatkan advokasi, perlindungan dan pemenuhan pelayanan.

Adapaun kewajiban masyarakat, antara lain:

- a. Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi layanan perizinan untuk memperbaiki pelayanannya apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- b. Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada Ombudsman apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan seperti dalam angka 1 di atas;
- c. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan;
- d. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum;
- e. Berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan Penyelenggara.

Pemberian izin berfungsi sebagai penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib maksudnya adalah agar izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi pengatur maksudnya agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan.

Pemberian izin bertujuan untuk pengendalian terhadap aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu di mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang baru dilaksanakan oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu:⁷

⁷ Op. cit., Adrian Sutedi, hlm 200-201.

1. Sisi pemerintah

Dari sisi pemerintah pemberian izin bertujuan untuk :

a. Melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

b. Sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permohonan izin, maka secara tidak langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.

2. Sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat pemberian izin bertujuan untuk:

- a. Adanya kepastian hukum;
- b. Adanya kepastian hak;
- c. Memudahkan mendapatkan fasilitas.

Dengan pengikatan suatu tindakan tertentu dengan perizinan, maka pembuat Undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan, yaitu:

- a. Keinginan mengarahkan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin mendirikan bangunan, izin gangguan (HO), dan lain-lain;
- b. Mencegah bahaya lingkungan, misalnya izin penebangan, izin usaha industri, dan lain-lain;

- c. Melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin membongkar monumen-monumen, izin mencari atau menemukan barang-barang peninggalan terpendam, dan lain-lain;
- d. Membagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbatas, misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk (SIP), dan lain-lain;
- e. Pengarahan dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktifitas tertentu, misalnya izin bertransmigrasi, dan lain-lain.

Izin memuat substansi sebagai berikut:

- a. Kewenangan lembaga;
- b. Pencantuman alamat;
- c. Substansi dalam diktum;
- d. Persyaratan;
- e. Penggunaan alasan;
- f. Penambahan substansi lainnya.

B. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana. Dalam perspektif hukum administrasi, dikemukakan oleh J.B.J.M Ten Berge bahwa pengawasan merupakan bagian yang penting dalam penegakan hukum administrasi. Pengawasan merupakan penegakan hukum preventif yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi.⁸

⁸ Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm 27.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengawasan diartikan sebagai suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Lebih lanjut lagi, Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian pengawasan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁹

Adapun pengawasan menurut Watson adalah suatu proses kegiatan yang berisi pengukuran, perbandingan, dan perbaikan serta berorientasi pada masa datang.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan didefinisikan oleh Marbun dalam dua pengertian, yaitu:

1. Mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan yang telah ditetapkan dan menindak atau memperbaiki penyimpangan.
2. Pengawasan berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (direktif), membina ke arah kesatuan bangsa (integratif), pemelihara dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (stabilitatif) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (prespektif), upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (korektif).¹⁰

Pengawasan apabila ditinjau dari segi aturan organisasi, terdiri atas dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal memiliki banyak manfaat, karena dapat langsung ke sumbernya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang benar terhadap pelaksanaan tugas dan pekerjaan, tanpa harus melalui prosedur yang berbeli-

⁹ Lembaga Administrasi Negara, *Pengawasan dan Pengendalian*, LAN, Jakarta, 1997, hlm 2.

¹⁰ S.F. Marbun, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm 267.

belit dan memakan waktu yang cukup lama. Pengawasan informal berupa laporan yang sering dimanipulasi. Laporan jenis ini dengan sendirinya menghilangkan sifat objektif suatu laporan, karena akan berubah menjadi laporan subjektif saja.

Pengawasan menurut Sujamto adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun tujuan dan kegunaan dari pengawasan, yaitu:¹¹

Tujuan:

1. Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran saja.
2. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara.

Kegunaan:

1. Untuk mendukung penegakan hukum.
2. Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh menegakkan peraturan perundang-undangan.
3. Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penyuluhan, anjuran, peringatan dan nasehat.

¹¹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 201-202.

Adapun lima unsur yang harus dipenuhi untuk adanya tindakan pengawasan menurut Muchsan, adalah sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administratif maupun secara yuridis.¹²

C. Minuman Beralkohol

Alkohol dalam ilmu kimia merupakan nama yang umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan/atau atom karbon lain.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras.¹⁴

¹² W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 132-133.

¹³ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati dkk, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elex Media Komputindo, 2009, hlm 01.

¹⁴ *Op.cit.*, KBBI versi Online (15 Januari 2016)

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Adapun yang disebut dengan minuman beralkohol tradisional, minuman ini dibuat secara tradisional dengan metode turun-menurun yang dikemas secara sederhana dan dapat dibuat sewaktu-waktu tergantung kebutuhan. Biasanya minuman beralkohol tradisional ini digunakan untuk kebutuhan acara adat-istiadat atau upacara keagamaan.¹⁵

D. Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 tentang Pembatalan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997

Mahkamah Agung beralasan pembatalan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang minuman keras lantaran beberapa undang-undang yang menjadi dasar pijakan terbitnya Keputusan Presiden itu dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penyusunan dan Pengawasan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia.

¹⁵*Op. cit.*, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berealkohol.

Karenanya, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Minuman Keras telah kehilangan dasar hukum kekuatan berlakunya. Sehingga beralasan tidak sah dan tidak berlaku umum. Itu yang menjadi pokok pertimbangan majelis.

E. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, minuman beralkohol dikelompokkan menjadi 3 golongan. Pertama, minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5%. Kedua, minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% sampai 20%. Ketiga, minuman beralkohol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% sampai 55%.¹⁶

Peraturan ini membatasi penyebaran minuman beralkohol dan memberi kewenangan lebih kepada pemerintah Daerah untuk mengaturnya. Dalam Peraturan Presiden ini, pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur pengawasan minuman beralkohol di wilayahnya. Hal ini bertujuan agar pembatasan peredaran minuman beralkohol bisa lebih merata. Pemerintah mengkategorikan minuman beralkohol sebagai barang dalam pengawasan serta daerah dapat melakukan pemetaan dan zonasi batas peredarannya.

¹⁶ Republika Online, SBY Terbitkan Peraturan Presiden Miras Baru (Online) [http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/01/02/mys4qe-sby-terbitkan-Peraturan Presiden-miras-baru](http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/01/02/mys4qe-sby-terbitkan-Peraturan_Presiden-miras-baru) (25 November 2015)

F. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol ini adalah perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Bila dalam Peraturan Menteri Perdagangan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 diperbolehkan menjual minuman beralkohol dengan kadar 5% di minimarket, maka dalam peraturan yang baru ini hal tersebut dilarang.

Menteri Perdagangan menyatakan pelarangan ini adalah dampak dari semakin gencarnya generasi muda yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Hal ini disebabkan karena minimarket sudah mulai masuk di berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari pemukiman warga, sekolah-sekolah, hingga rumah ibadah.

Peraturan Menteri Perdagangan ini merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empiris. Konsep penelitian hukum ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat dalam upaya untuk meneliti bagaimana berjalannya suatu hukum. Penelitian ini mengambil fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris karena dibutuhkan fakta-fakta untuk dapat mendukung dalam menjawab rumusan masalah yang ada terkait dengan upaya pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang berarti hukum merupakan gejala sosial yang dikaji sebagai variabel bebas dan mengandung sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat terhadap variabelsosiologi lainnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkap gejala atau fenomena secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung lewat keterlibatan peneliti sebagai instrumen kunci.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pola nalar induktif.¹

Selain menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan operasional. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menggabungkan kata-kata dengan obyek tertentu, sehingga dapat menghasilkan arti kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.²

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini memilih lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Mojokerto. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto belum mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pada Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri terkait dengan Peredaran Minuman Beralkohol. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk memilih daerahnya akan bebas miras atau akan membuat *zoning* wilayah peruntukan kegiatan miras sesuai dengan muatan lokal dan budaya masing-masing. Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah dengan tenaga kerja asing yang cukup banyak. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto harus mengatur peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan hal tersebut. Penulis tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian di Kabupaten Mojokerto, guna untuk

¹ Eti Setiawati, *Bahasa Indonesia Keilmuan dalam Karya Tulis Ilmiah*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2008, hlm.109.

² Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306

melihat upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto selama belum ada Peraturan Daerah terkait yang mengatur.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis. Jenis data ini merupakan data asli dan tidak dimaipulasi. Untuk mendapatkan data ini, penulis harus mengumpulkan data secara langsung ke lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada. Jadi penulis merupakan tangan kedua, karena penulis hanya mengumpulkan data berdasarkan sumber data yang sudah tersedia.

E. Teknik Memperoleh Data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur, dan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, jurnal, buku-buku maupun literatur, hasil penelitian ilmiah, penelusuran di internet, penelusuran

peraturan perundang-undangan dan sebagainya, yang dapat menunjang bahan hukum primer.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mojokerto.

b. Sampel

Dalam penelitian ini sampel berasal dari Staf di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mojokerto

c. Teknik Sampling

Proses menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu merupakan suatu proses pemilihan sampel yang didasarkan atas pertimbangan/penelitian subyektif dari peneliti, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi.³

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian yuridis empiris ini adalah dengan menggunakan teknik kualitatif untuk hasil wawancara. Karena pelaksanaan penelitian ini terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, serta

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 91

menekankan pada deskripsi secara alami, maka penelitian ini biasa disebut dengan penelitian kualitatif naturalistik.⁴ Dalam penelitian ini penulis dituntut untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diteliti.

H. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan pengawasan yang dimaksud adalah pengendalian dan pengawasan terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto yang bertujuan untuk menjamin agar peredaran minuman beralkohol dapat dibatasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Izin Usaha Perdagangan

Penulis memfokuskan pada izin usaha perdagangan minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto.

3. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

4. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 101

repository.ub.ac.id

Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto merupakan instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto.

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto merupakan *leading sector* dari tim penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto.

6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat penegak Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto bertugas untuk melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penulisan yang terstruktur, maka dalam penelitian ini menggunakan format penulisan penelitian sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori-teori tersebut akan dipakai dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian, yang meliputi tinjauan tentang alkohol, tinjauan tentang perizinan, tinjauan tentang Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, tinjauan tentang

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, dan tinjauan tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2015.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis data, serta definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan metode penelitian yang digunakan, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengendalian dan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto terhadap perizinan tempat usaha minuman beralkohol terkait dengan belum dikeluarkannya Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Mojokerto.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

1. Letak Geografis Kabupaten Mojokerto

Wilayah Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan wilayah Kabupaten lain, sebelah utara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik, sebelah timur Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan, sebelah selatan Kabupaten Malang dan Kota Batu dan sebelah barat Kabupaten Jombang.

Wilayah Kabupaten Mojokerto yang cenderung landai di tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian Selatan merupakan Gondang dan Jatirejo. Bagian tengah yang merupakan wilayah datrab, sedangkan bagian utara merupakan wilayah dataran, sedangkan utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur.

Secara administratif wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan dan 304 desa. Luas wilayah Kabupaten Mojokerto seluruhnya adalah 96.936 Ha.

Dengan melihat letak Kabupaten Mojokerto yang strategis Kabupaten Mojokerto yang juga sebagai penyangga kota Surabaya mempunyai pengembangan kawasan industri di wilayah utara sungai seluas 10.000 Ha.

Kabupaten Mojokerto di samping kawasan industri terdapat bekas pusat kerajaan Mojopahit yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.

Potensi besar lainnya berupa kawasan pegunungan yang berpotensi dikembangkan sebagai daerah wisata alam; merupakan lereng dari rangkaian pegunungan Penanggungan, Arjuno, Welirang dan Anjasmoro yang terdapat di wilayah Kecamatan Pacet dan Trawas.

Luas wilayah Kabupaten Mojokerto adalah 6.92,15 km² atau 1,72% dari seluruh luas wilayah Jawa Timur, dan terdiri dari 18 Kecamatan dengan 299 desa dan 5 Kelurahan. Berikut adalah batas-batas wilayah Kabupaten Mojokerto:

- Sebelah Utara :Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik.
- Sebelah Timur :Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.
- Sebelah Selatan :Kabupaten Malang.
- Sebelah Barat :Kabupaten Jombang.

2. Keadaan Sosial Ekonomi Kabupaten Mojokerto

Secara umum pendapatan regional per kapita penduduk Kabupaten Mojokerto atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

PDRB per Kapita Menurut Kecamatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2014.

Tabel 4.1

Daftar Pendapatan Regional Per Kapita Penduduk Kabupaten Mojokerto

No.	Kecamatan	PDRB Perkapita Kecamatan (Rp)
1.	Trawas	78.870.247
2.	Pacet	62.772.256
3.	Mojosari	57.465.880
4.	Gondang	56.207.038
5.	Jatirejo	53.862.584
6.	Ngoro	53.341.057
7.	Sooko	52.911.380
8.	Bangsals	50.205.219
9.	Puri	46.955.852
10.	Jetis	46.898.048
11.	Pungging	46.744.652
12.	Trowulan	45.682.926
13.	Mojoanyar	45.531.115
14.	Dawarblandong	45.358.684
15.	Kemlagi	43.733.039
16.	Dlanggu	43.440.686
17.	Gedeg	42.484.616
18.	Kutorejo	38.822.387

Sumber: *Data Sekunder, diolah 2016*

3. Gambaran Umum Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto

Awal berdirinya instansi yang membidangi Perijinan satu pintu di Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2004 dengan nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perijinan yang dibawah kendali langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. UPT Perijinan ini berjalan selama 5 (lima) tahun sampai tahun 2009. Selanjutnya amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka dirubah dan berdiri sendiri menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Kemudian pada Tahun 2013 dirubah menjadi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM). Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkaitan Pendirian BPMPTSP (Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu) diseluruh Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto sedang menggodok Perubahan Nomenklatur baru menjadi BPMPTS (Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu).

Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto kini beralamatkan di Jl. RA. Basuni No 14 Sooko Kabupaten Mojokerto.

Adapun jenis-jenis pelayanan perijinan yang dilaksanakan di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2013

Tentang Penyelenggaraan Perizinan, adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Penanaman Modal
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 2. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
 3. Izin Lokasi.
- b. Bidang Perijinan Tertentu
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
 3. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Bidang Usaha Industri dan Perdagangan
 1. Izin Gangguan (HO)
 2. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 4. Tanda Daftar Industri (TDI)
 5. Izin Usaha Industri (IUI)
 6. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
- d. Bidang Jasa Usaha
 1. Bidang Kesehatan :
 - 1.1. Izin Klinik;
 - 1.2. Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D
 - 1.3. Izin Rumah Sakit Swasta setara Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D;
 - 1.4. Izin Toko Alat Kesehatan;

1.5. Izin Laboratorium Kesehatan;

1.6. Izin Apotek;

1.7. Izin Toko Obat;

1.8. Izin Optikal.

2. Bidang Media :

2.1. Izin Usaha Media Elektronika;

2.2. Izin Usaha Percetakan;

2.3. Izin Usaha Pameran.

3. Bidang Ketenagakerjaan :

3.1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja

3.2. Izin Unit Pelayanan, Penyuluhan, Dan Pendaftaran
Tenaga Kerja Indonesia (UP3CTKI)

4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata :

4.1. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata :

a. Pengelolaan pemandian air panas alami;

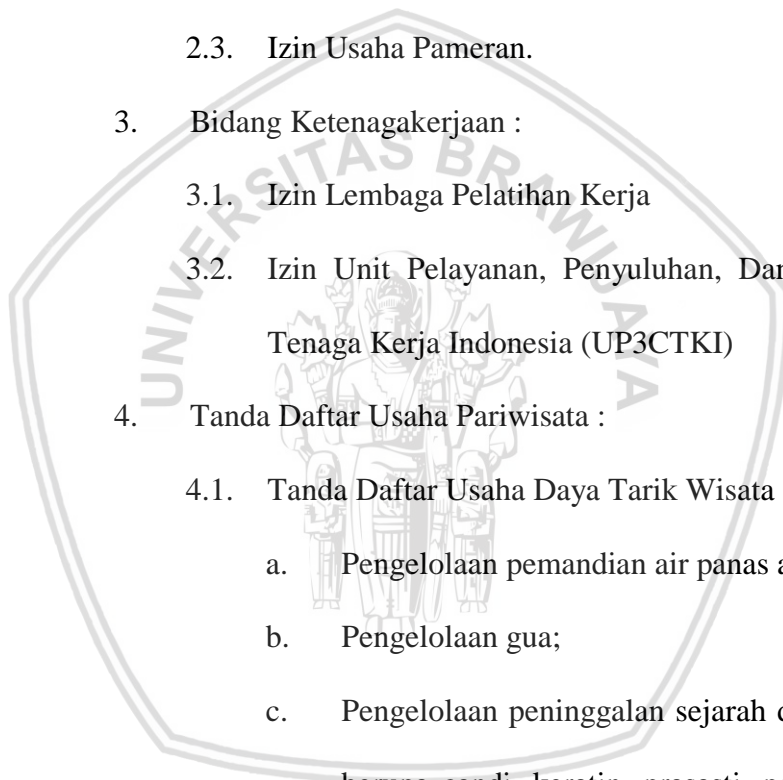
b. Pengelolaan gua;

c. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakal
berupa candi, keratin, prasasti, pertilasan dan
bangunan kuno;

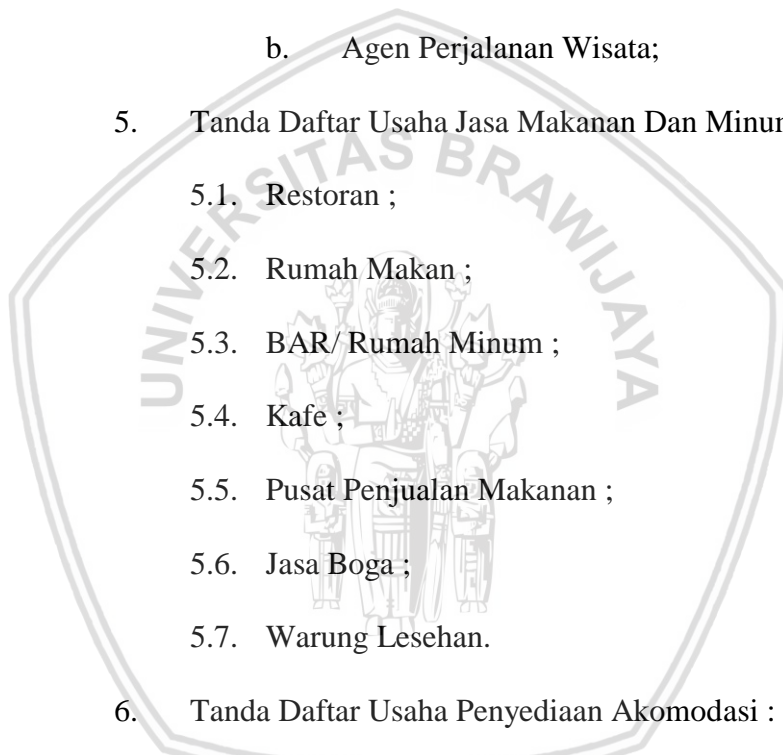
d. Pengelolaan museum;

e. Pengelolaan pemukiman dan/ atau lingkungan
adat;

f. Pengelolaan obyek ziarah.



- 4.2. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
- 4.3. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Pariwisata:
 - a. Angkutan Jalan Wisata;
 - b. Angkutan Kereta Api Wisata;
 - c. Angkutan Sungai Dan Danau Wisata;
- 4.4. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata:
 - a. Biro Peralanan Wisata;
 - b. Agen Perjalanan Wisata;
5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan Dan Minuman :
 - 5.1. Restoran ;
 - 5.2. Rumah Makan ;
 - 5.3. BAR/ Rumah Minum ;
 - 5.4. Kafe ;
 - 5.5. Pusat Penjualan Makanan ;
 - 5.6. Jasa Boga ;
 - 5.7. Warung Lesehan.
6. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi :
 - 6.1. Hotel, Meliputi Sub Jenis Usaha :
 - a. Hotel Berbintang;
 - b. Hotel Non-Bintang.
 - 6.2. Bumi Perkemahan;
 - 6.3. Persinggajan/ Caravan;
 - 6.4. Villa;
 - 6.5. Pondok Wisata/ Home Stay;



6.6. Akomodasi Lainnya.

7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi :

7.1. Gelanggang Olah Raga :

- a. Lapangan Golf;
- b. Rumah Bilyar;
- c. Gelanggang Renang;
- d. Lapangan Tennis;
- e. Gelanggang Bowling;
- f. Lapangan Futsal;
- g. Lapangan Bulutangkis;
- h. Pusat Kebugaran Jasmani (Fitness Centre);
- i. Kolam Memancing;
- j. Sanggar Senam.

7.2. Gelanggang Seni :

- a. Sanggar Seni;
- b. Galeri Seni;
- c. Gedung Pertunjukan Seni;
- d. Studio Music/ Sekolah Musik.

7.3. Arena Permainan

- a. Arena Permainan;
- b. Gelanggang Permainan Dan Ketangkasan (Outbond);

7.4. Hiburan Malam:

- a. Kelab Malam;
- b. Diskotik;
- c. Pub;
- d. Bioskop/ Pertunjukan Film;
- e. Panti Pijat;
- f. Taman Rekreasi;

- Taman Rekreasi;

- Taman Bertema Dan

g. Karaoke

h. Jasa Impresariat/ promotor

8. Tanda Daftar Usaha jas penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

9. Tanda daftar usaha jasa informasi pariwisata

10. Tanda daftar usaha jasa konsultasi pariwisata

11. Tanda daftar usaha jasa pramuwisata

12. Tanda daftar usaha wisata tirta :

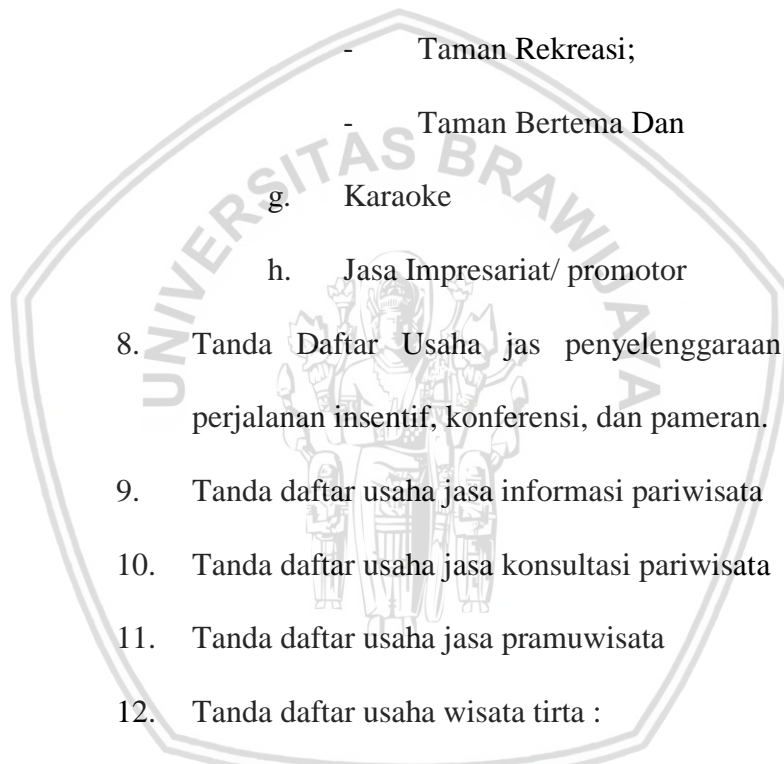
12.1. Wisata Arung jeram;

12.2. Wisata dayung.

13. Tanda daftar usaha SPA/ Salon kecantikan

e. Bidang Pemakaian Kekayaan Daerah

1. Izin Pemakaian Tanah Untuk Tidak Permanen, Semi Permanen;



2. Izin Pemakaian Tanah Untuk Keperluan Lainnya:
Pemasangan Reklame

f. Bidang Penyelenggaraan Reklame

1. Reklame Papan/ Billnoard/ Megatron/ Bando Jalan/
Baliho/ Rombong
2. Reklame Kain/ Plastik/ Sunscreen
3. Reklame Melekat (Stiker)
4. Reklame Selebaran/ Brosur/ Leaflet
5. Reklame Berjalan, Termasuk Pada Kendaraan
6. Reklame Udara
7. Reklame Suara
8. Reklame Film/ Slide
9. Reklame Peragaan
10. Reklame Lainnya

g. Bidang Air Tanah

1. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
2. Izin Pengeboran Ir Bawah Tanah (Sip);
3. Izin Pengambilan Air Tanah (Sipa) Sumur Bor;
4. Izin Pengambilan Air Tanah (Sipa) Sumur Pasak.

h. Bidang Usaha Pertambangan (Iup)/ Izin Pertambangan Rakyat
(Ipr)

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi



3. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan Dan Penjualan;
4. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengelolaan Dan Permunian:

Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto.

b. Badan Tata Usaha

Badan Tata Usaha mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal meliputi penyusunan rencana kegiatan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kordinasi, penyusunan program kerja Badan, pengumpulan, dan pengolahan data;
2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran danpertanggungjawaban keuangan;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;

4. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dalam rangka penyusunan program dan anggaran;
2. Melaksanakan pengumpulan dan sistemasi data untuk bahan penyusunan program;
3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan anggaran
4. Melaksanakan daftar inventarisasi kegiatan dinas dan penyiapan bahan rapat kerja;
5. Menyusun rencana pendapatan retribusi daerah dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah;
6. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program danpetunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang umum dan kepegawaian;
5. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program danpetunjuk teknis di bidang keuangan;
2. Menyiapkan bahan penatausahaan di bidang pengelolaan keuanganmenyiapkan bahan pengawasan dan pengendalianprogram di bidang keuangan;
3. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikanoleh Kepala Bagian Tata Usaha.

c. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal meliputi pengembangan, promosi, monitoring dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi tim teknis yang terdiri dari unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang program penanaman modal;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal;
3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program pengembangan, promosi, monitoring dan evaluasi penanaman modal;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam bidang investasi daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan ijin pemanfaatan ruang, ijin lokasi dan ijin penanaman modal;
6. Penyusunan bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Pengembangan dan Promosi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Meyiapkan penyusunan program penanaman modal dan petunjuk teknis pelayanan perijinan;

2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi perijinan dan penanaman modal;
3. Melaksanakan penelitian dan pengkajian potensi daerah untuk pengembangan penanaman modal;
4. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama, promosi dan sistem informasi penanaman modal;
5. Melaksanakan proses administrasi pelayanan ijin lokasi dan ijin pemanfaatan ruang;
6. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal.

Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program monitoring dan evaluasi penanaman modal;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis monitoring dan evaluasi penanaman modal;
3. Menyusun data penanaman modal;
4. Melaksanakan pemantauan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
5. Melaksanakan proses administrasi pelayanan ijin penanaman modal;
6. Melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumentasi ijin penanaman modal;

7. Membantu menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan penanaman modal dalam negeri;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal.

d. Bidang Perijinan Usaha Industri dan Perdagangan

Bidang Perijinan Usaha Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal di bidang perijinan usaha industry perdagangan dan gangguan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang perijinan Usaha Industri memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan industry perdagangan serta ijin gangguan;
2. Pelaksanaan administrasi perijinan di bidang perijinan industry, perdagangan dan ijin gangguan;
3. Pemberian pelayanan industry perdagangan dan ijin gangguan;
4. Pemberian pelayanan perijinan industry perdagangan dan gangguan;
5. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang perijinan industry dan perdagangan;

6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- e. Bidang Perijinan dan Usaha

Bidang Perijinan Jasa Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal di bidang perijinan jasa usaha yaitu bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata, pemakaian kekayaan daerah, bidang reklame/ iklan, ijin usaha pertambangan, air bawah tanah dan air permukaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perijinan Jasa Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan usaha;
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam pemberian pelayanan perijinan usaha;
3. Pelaksanaan Administrasi perijinan di bidang perijinan jasa usaha;
4. Pemberian pelayanan perijinan usaha;
5. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan ijin bidang jasa usaha;
6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

f. Bidang Perijinan Tertentu

Bidang Perijinan Tertentu mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yaitu menangani ijin mendirikan bangunan, ijin minuman beralkohol dan ijin usaha jasa konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Perijinan Tertentu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi tim teknis yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan tertentu;
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam pemberian pelayanan perijinan di bidang perijinan tertentu;
3. Pelaksanaan administrasi perijinan di bidang perijinan tertentu;
4. Pelayanan perijinan tertentu;
5. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan lingkup bidang perijinan tertentu;
6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain oleh Kepala Badan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun rancangan visi, misi, motto dan slogan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto, yakni:

Visi:

“Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang perijinan dan menumbuhkan investasi daerah dalam rangka menunjang pembangunan daerah yang mandiri, demokratis, adil, makmur, dan bermartabat.”

Misi:

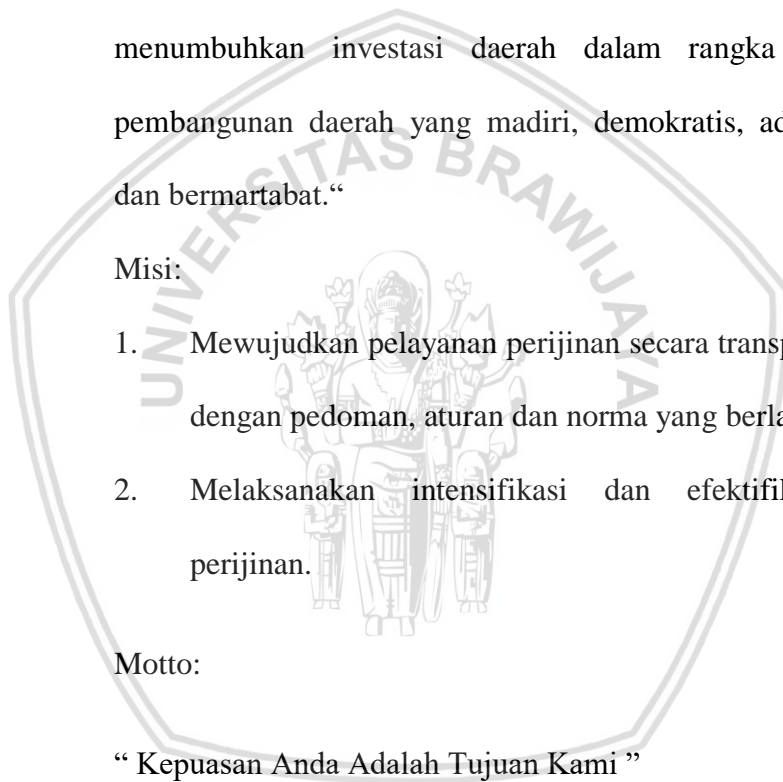
1. Mewujudkan pelayanan perijinan secara transparan, sesuai dengan pedoman, aturan dan norma yang berlaku;
2. Melaksanakan intensifikasi dan efektifikasi obyek perijinan.

Motto:

“Kepuasan Anda Adalah Tujuan Kami ”

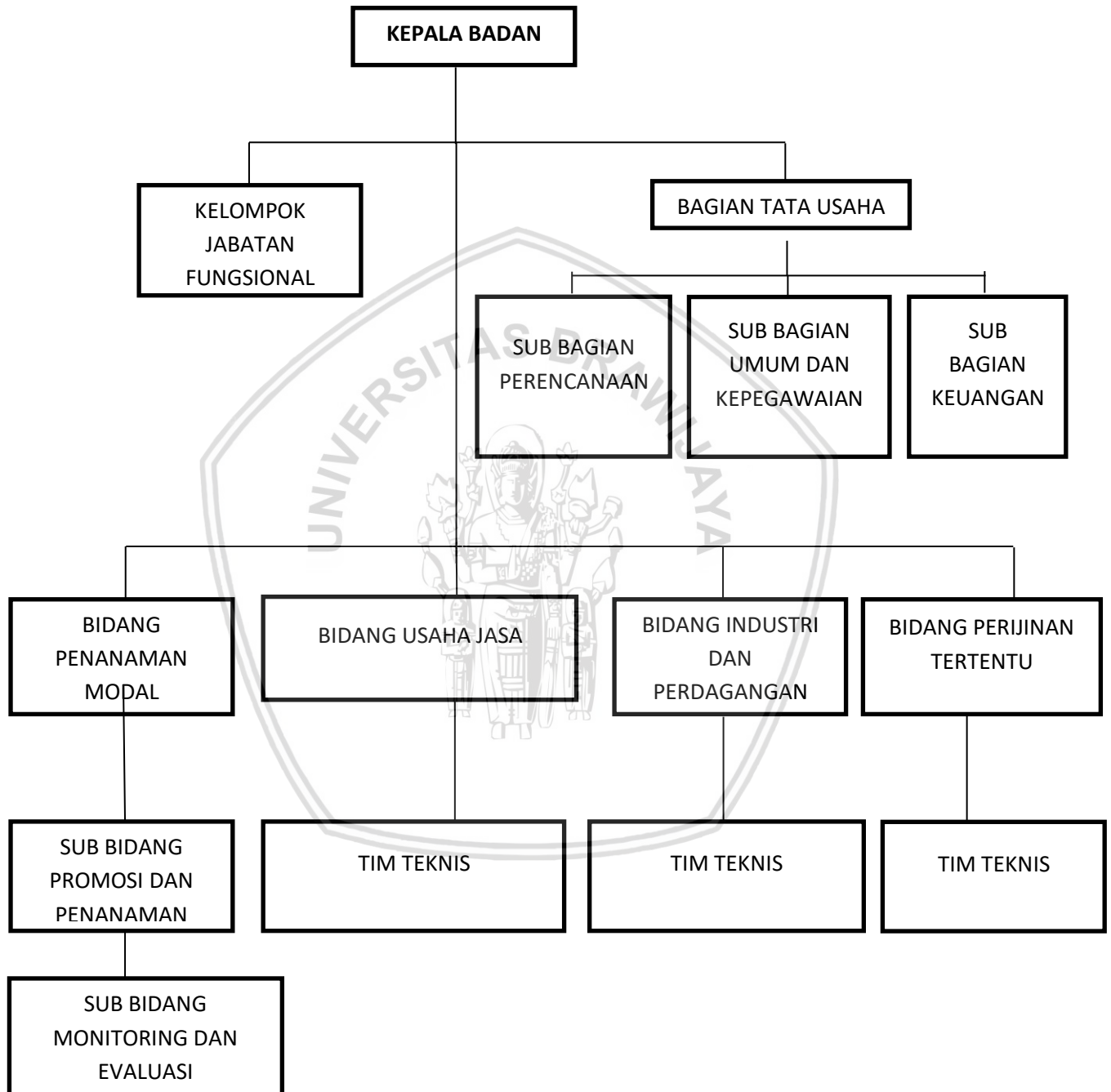
Slogan:

“ Kami Siap Membantu Usaha Anda ”



Bagan 4.1

Struktur Organisasi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto



Sumber: *Data Sekunder, diolah 2016*

4. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

b. Sekretariat

1. Sekretariat bertugas untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
3. Pelaksanaan koordinasi dan pengintegrian kegiatan administrasi tingkat internal bagian sekretariat dan bidang bina perindustrian dan perdagangan;
4. Pemberian bimbingan, petunjuk, pengawasan serta penilaian pelaksanaan tugas masing-masing bawahannya;
5. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang organisasi tata laksana dan peningkatan aparatur pemerintah di lingkungan dinas;
6. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;

8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

1. Mengadakan koordinasi, memberi bimbingan dan petunjuk serta mengadakan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas masing-masing bawahannya;
2. Mengurus, mengatur dan melayani kebutuhan rumah tangga kantor;
3. Memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. Mengatur, melaksanakan dan mengkoordinir tugas-tugas protokoler dan penyelenggaraan rapat-rapat;
5. Mengatur, melaksanakan dan memperlancar tugas surat-menyerat (pengiriman dan penerimaan surat-surat serta penyimpanannya);
6. Mengerjakan pencatatan surat-surat masuk dan surat-surat keluar;
7. Melampiri surat-surat masuk dengan lembaran blangko disposisi serta mengisi tanggal, nomor surat masuk dan nomor agenda surat masuk;
8. Menyerahkan surat-surat masuk kepada pimpinan;
9. Mengurus pelaksanaan penghapusan barang-barang inventaris kantor yang sudah rusak;

10. Melaksanakan administrasi kepegawaian termasuk menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip kepegawaian;
11. Mempersiapkan perencanaan penyusunan formasi, penerimaan pegawai, dan cuti pegawai;
12. Mempersiapkan pengusulan kenaikan pangkat/ golongan dan gaji berkala bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
13. Mempersiapkan dan mengurus usul permintaan Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Istri/ Suami;
14. Menyiapkan dan mengurus usul pensiunan pegawai yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
15. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
16. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penyusunan program;
2. Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian ndata statistic;

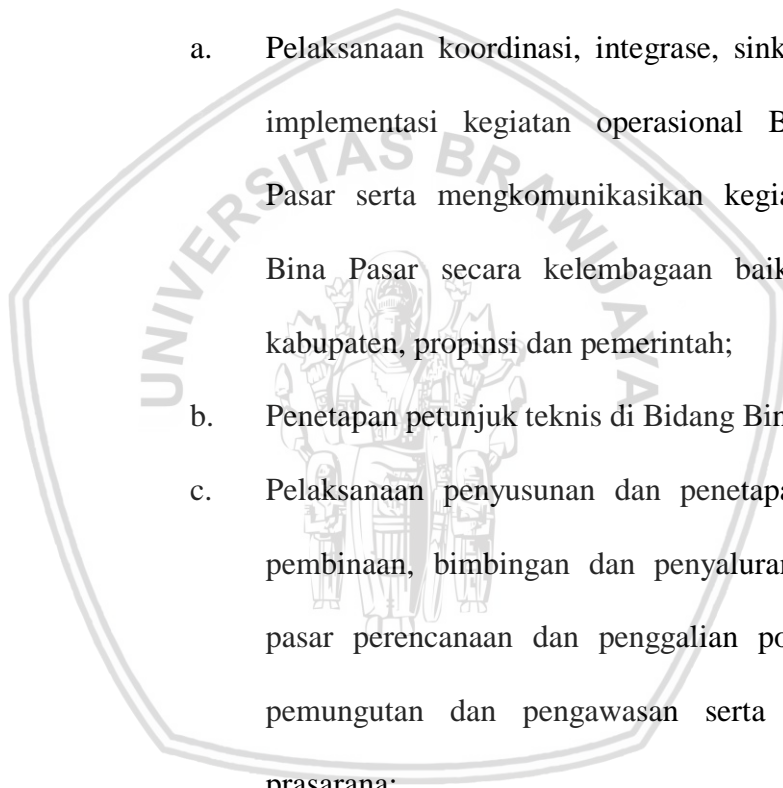
3. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana program dan proyek serta penetapan rencana strategis pengembangan;
4. Melaksanakan penyusunan rencana operasional kegiatan beserta kebutuhan anggaran;
5. Melaksanakan analisis dan pengendalian pelaksanaan program dan proyek;
6. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

1. Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
2. Menyiapkan usulan anggaran dinas;
3. Mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
5. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Bina Pasar

1. Bidang Bina Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang meliputi sarana dan prasarana, pemungutan dan pengawasan serta tatalaksana.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Bina Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan koordinasi, integrase, sinkronisasi dan implementasi kegiatan operasional Bidang Bina Pasar serta mengkomunikasikan kegiatan Bidang Bina Pasar secara kelembagaan baik di daerah kabupaten, propinsi dan pemerintah;
 - b. Penetapan petunjuk teknis di Bidang Bina Pasar;
 - c. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan pedoman pembinaan, bimbingan dan penyaluran di bidang pasar perencanaan dan penggalian potensi pasar, pemungutan dan pengawasan serta sarana dan prasarana;
 - d. Pelaksanaan pemberian petunjuk, mengawasi, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang pengelolaan pasar;
 - e. Pelaksanaan pengarahan pedoman bimbingan teknis setiap kegiatan operasional;



- f. Penciptaan iklim usaha yang sehat dan mengadakan kerja sama antara pelaku usaha di bidang pasar;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Sarana dan Prasaran mempunyai tugas:

- a. Mengatur dan melayani kebutuhan sarana dan prasaran pengelolaan pasar;
- b. Menyusun dan merencanakan pengadaan dan pemeliharaan fisik pasar;
- c. Melaksanakan pengadaan karcis dan proporasinya;
- d. Melaksanakan pelayanan keamanan pasar;
- e. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan pasar;
- f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pasar.

Seksi Pemungutan dan Pengawasan mempunyai tugas:

- a. Menyusun laporan teknis pembinaan pemungutan retribusi pasar;
- b. Melaksanakan pengendalian benda berharga;
- c. Melaksanakan pengawasan kegiatan pemungutan retribusi pasar;
- d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pasar.

Seksi Tatalaksana mempunyai tugas:

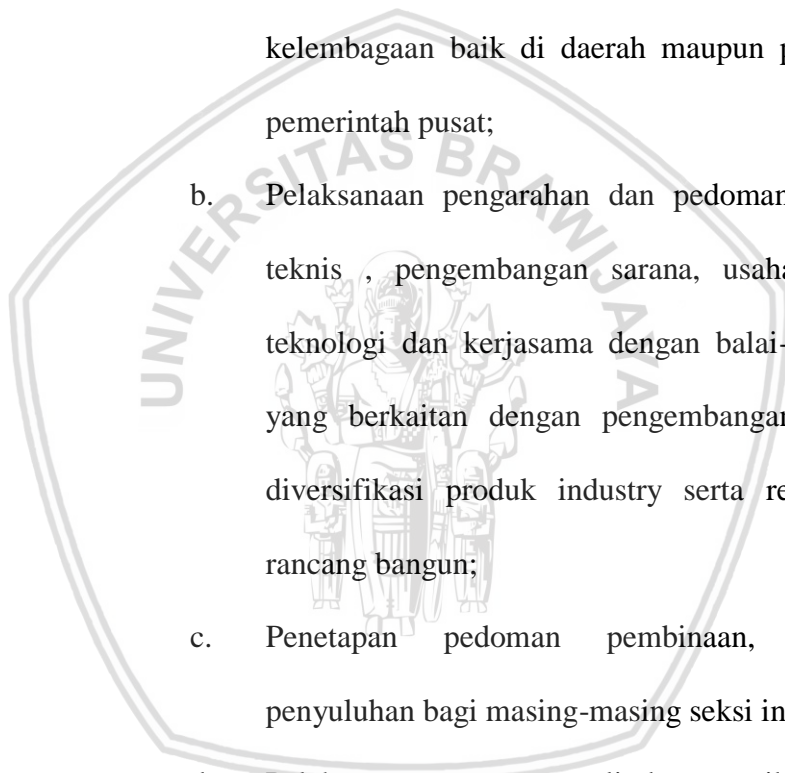
- a. Menyusun, merencanakan dan mempersiapkan operasional retribusi pasar;
- b. Menyusun dan merencanakan peningkatan dan pengendalian potensi pasar;
- c. Menyusun perencanaan pendapatan retribusi pasar;
- d. Melaksanakan pengendalian operasional pengelolaan pasar;
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pasar.

d. Bidang Bina Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika

1. Bidang Bina Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi bimbingan industry logam dan mesin, bimbingan industry aneka dan tekstil serta bimbingan industry alat transportasi, elektronika dan telematika.
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Bina Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi,

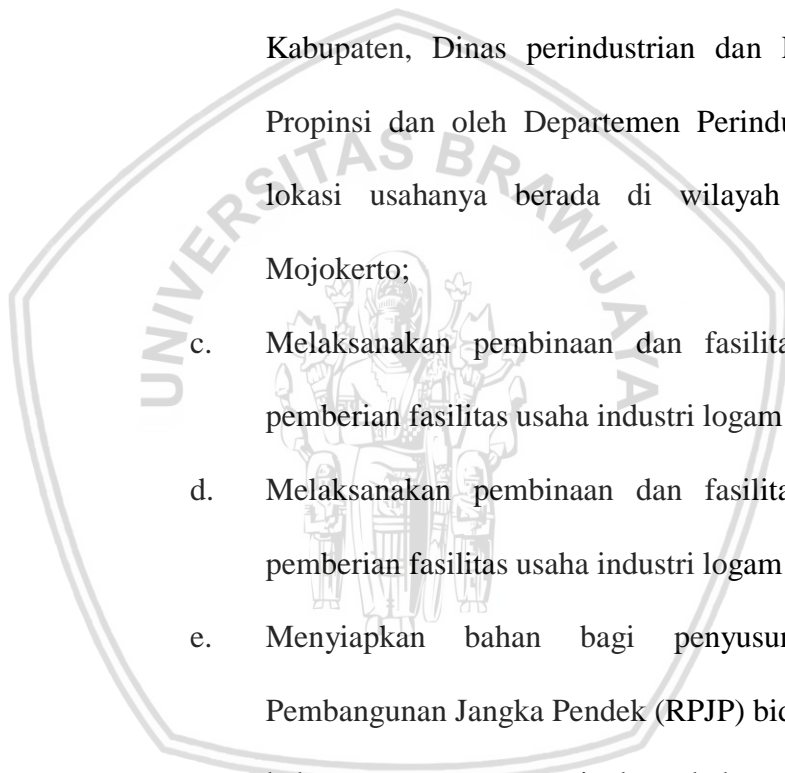
Elektronika dan Telematika mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional Bidang industry Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET), serta mengkomunikasikan kegiatan ILMATET secara kelembagaan baik di daerah maupun propinsi dan pemerintah pusat;
- b. Pelaksanaan pengarahan dan pedoman bimbingan teknis , pengembangan sarana, usaha, produksi, teknologi dan kerjasama dengan balai-balai teknik yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, diversifikasi produk industry serta rekayasa dan rancang bangun;
- c. Penetapan pedoman pembinaan, bimbingan, penyuluhan bagi masing-masing seksi industry;
- d. Pelaksanaan upaya perlindungan iklim usaha, peningkatan kerjasama antar industry dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

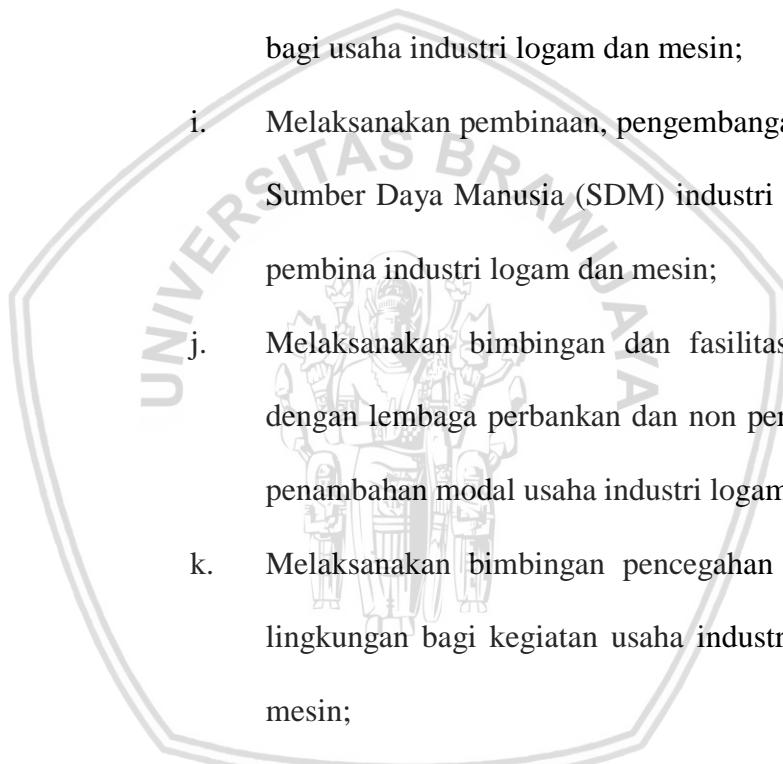


Seksi Industri Logam dan Mesin mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dan kerjasama di bidang industri dan mesin;
- b. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi Berita Acara Penerimaan (BAP) dan rekomendasi terhadap setiap penerbitan ijin industri yang diterbitkan di Kabupaten, Dinas perindustrian dan Perdagangan Propinsi dan oleh Departemen Perindustrian yang lokasi usahanya berada di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri logam dan mesin;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri logam dan mesin;
- e. Menyiapkan bahan bagi penyusun Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) bidang industri kabupaten serta menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Seksi Bimbingan Industri Logam dan Mesin;
- f. Melaksanakan kegiatan promosi produk industri logam dan mesin;



- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri logam dan mesin;
- h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan International Certification Organization (ISO) 9000 bagi usaha industri logam dan mesin;
- i. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan diklat Sumber Daya Manusia (SDM) industri dan aparatur pembina industri logam dan mesin;
- j. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi kerjasama dengan lembaga perbankan dan non perbankan bagi penambahan modal usaha industri logam dan mesin;
- k. Melaksanakan bimbingan pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri logam dan mesin;
- l. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri logam dan mesin dan antara usaha industri logam dan mesin dengan usaha ekonomi lainnya;
- m. Melaksanakan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;

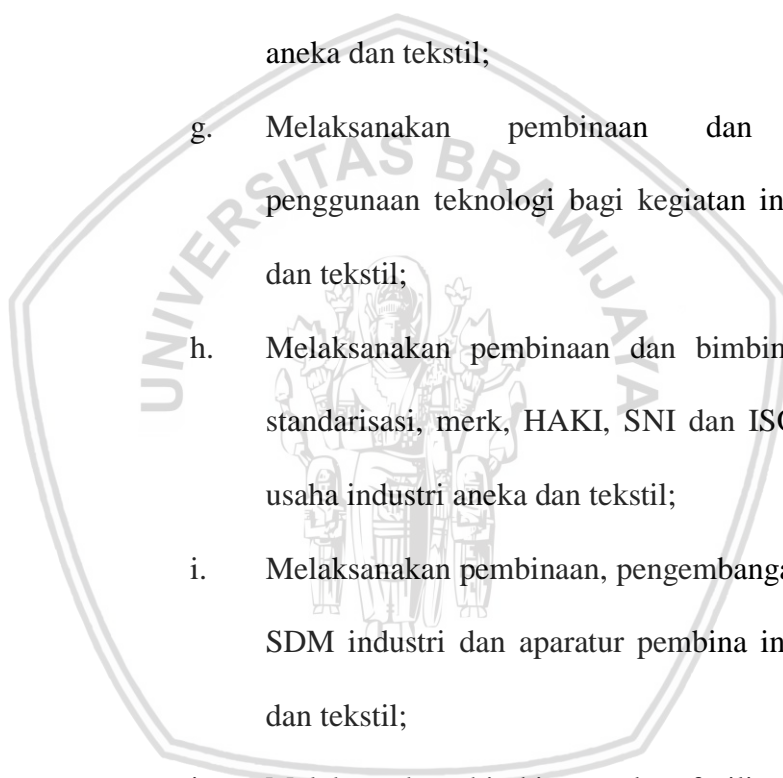


- n. Melaksanakan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri logam dan mesin;
- o. Menyusun data potensi industri logam dan mesin sebagai bahan informasi lintas kabupaten, propinsi maupun pusat;
- p. Melaksanakan pengawasan kegiatan pembangunan industri logam dan mesin;
- q. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika.

Seksi Industri Aneka dan Tekstil, mempunyai tugas:

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dan kerjasama di bidang industri aneka dan tekstil;
- b. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi BAP dan rekomendasi terhadap setiap penerbitan ijin industri yang diterbitkan di kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi dan oleh Departemen Perindustrian yang lokasi usahanya berada di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri aneka dan tekstil;

- d. Melaksanakan pembinaan terhadap perlindungan usaha industri aneka dan tekstil;
- e. Menyiapkan bahan bagi penyusun RPJP bidang industri kabupaten serta menyiapkan bahan penyusunan RPJM, SKPD Seksi Industri Aneka dan Tekstil;
- f. Melaksanakan kegiatan promosi produk industri aneka dan tekstil;
- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri aneka dan tekstil;
- h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, HAKI, SNI dan ISO 9000 bagi usaha industri aneka dan tekstil;
- i. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri aneka dan tekstil;
- j. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi kerjasama dengan lembaga perbankan dan non perbankan bagi penambahan modal usaha industri aneka dan tekstil;
- k. Melaksanakan bimbingan pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri aneka dan tekstil;

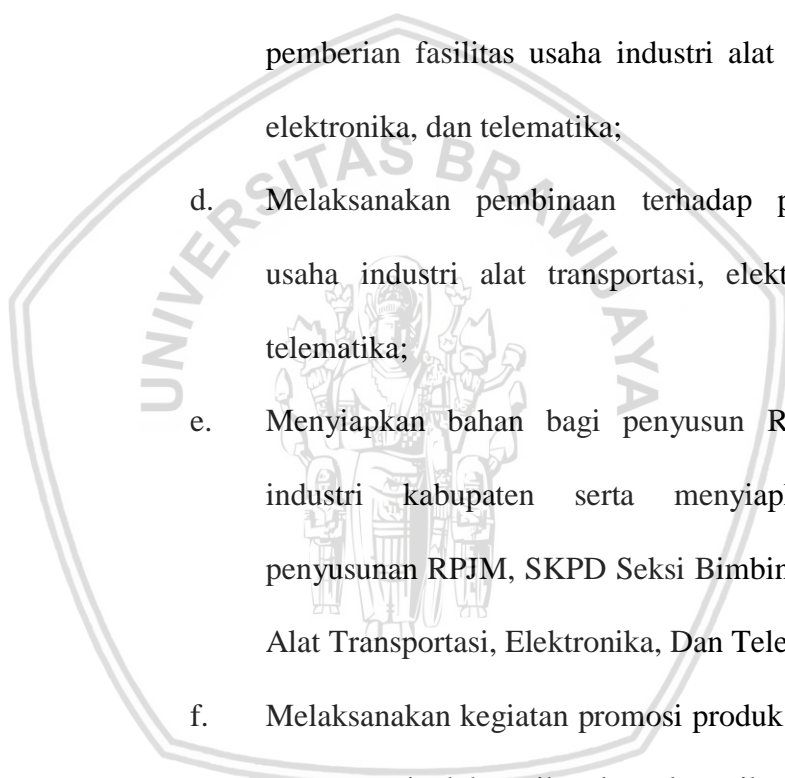


- l. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri aneka dan tekstil dan antara usaha industri aneka dan tekstil dengan usaha ekonomi lainnya;
- m. Melaksanakan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;
- n. Melaksanakan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri aneka dan tekstil;
- o. Menyusun data potensi industri aneka dan tekstil sebagai bahan informasi lintas kabupaten, propinsi maupun pusat;
- p. Melaksanakan pengawasan kegiatan pembangunan industri aneka dan tekstil;
- q. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika.

Seksi Industri Alat Transportasi, Elektronika, dan Telematika, mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dan kerjasama di bidang industri alat transportasi, elektronika, dan telematika;

- b. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi BAP dan rekomendasi terhadap setiap penerbitan ijin industri yang diterbitkan di kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi dan oleh Departemen Perindustrian yang lokasi usahanya berada di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri alat transportasi, elektronika, dan telematika;
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap perlindungan usaha industri alat transportasi, elektronika, dan telematika;
- e. Menyiapkan bahan bagi penyusun RPJP bidang industri kabupaten serta menyiapkan bahan penyusunan RPJM, SKPD Seksi Bimbingan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Dan Telematika;
- f. Melaksanakan kegiatan promosi produk industri alat transportasi, elektronika, dan telematika;
- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri alat transportasi, elektronika, dan telematika;
- h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, HAKI, SNI dan ISO 9000 bagi



usaha industri alat transportasi, elektronika, dan telematika;

- i. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri alat transportasi, elektronika, dan telematika;
- j. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi kerjasama dengan lembaga perbankan dan non perbankan bagi penambahan modal usaha industri alat transportasi, elektronika, dan telematika;
- k. Melaksanakan bimbingan pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri alat transportasi, elektronika, dan telematika;
- l. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri alat transportasi, elektronika, dan telematika dan antara usaha industri alat transportasi, elektronika, dan telematika dengan usaha ekonomi lainnya;
- m. Melaksanakan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;
- n. Melaksanakan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri alat transportasi, elektronika, dan telematika;

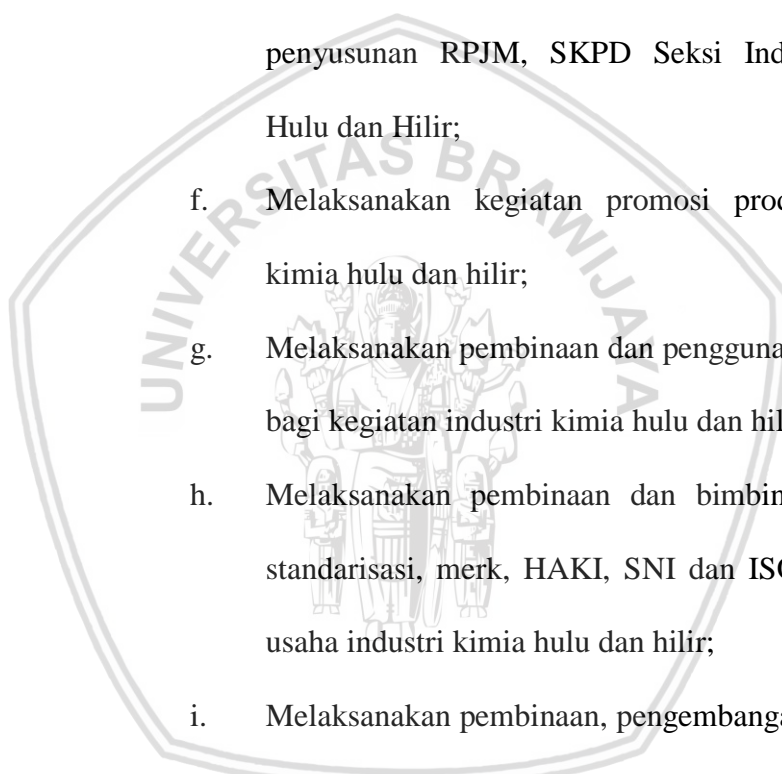
- o. Menyusun data potensi industri sebagai bahan informasi lintas kabupaten, propinsi maupun pusat;
 - p. Melaksanakan pengawasan kegiatan pembangunan industri alat transportasi, elektronika, dan telematika;
 - q. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika.
- e. Bidang Bina Industri Kimia dan Agro
- 1. Bidang Bina Industri Kimia dan Agro, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi hasil hutan dan perkebunan, idustri hasil hutan dan perkebunan serta industry hasil hutan dan perkebunan.
 - 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Bina Industri Kimia dan Agro mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional bidang Industri Kimia dan Agro (IKA), serta mengkomunikasikan kegiatan IKA secara kelembagaan baik di daerah maupun propinsi dan pemerintah pusat;

- b. Pelaksanaan pengarahannya dan pedoman bimbingan teknis, pengembangan sarana, usaha, produksi, teknologi dan kerjasama dengan balai-balai teknik yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, diversifikasi produk industri serta rekayasa dan rancang bangun;
- c. Penetapan pedoman pembinaan, bimbingan, penyuluhan bagi masing-masing seksi industri;
- d. Pelaksanaan upaya perlindungan iklim usaha, peningkatan kerjasama antar industri dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir, mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dan kerjasama dibidang industri kimia hulu dan hilir;
- b. Melaksanakan pembinaan, fasilitas BAP dan rekomendasi terhadap setiap penerbitan ijin industri yang diterbitkan di Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi dan oleh Departemen Perindustrian yang lokasi usahanya berada di wilayah Kabupaten Mojokerto;

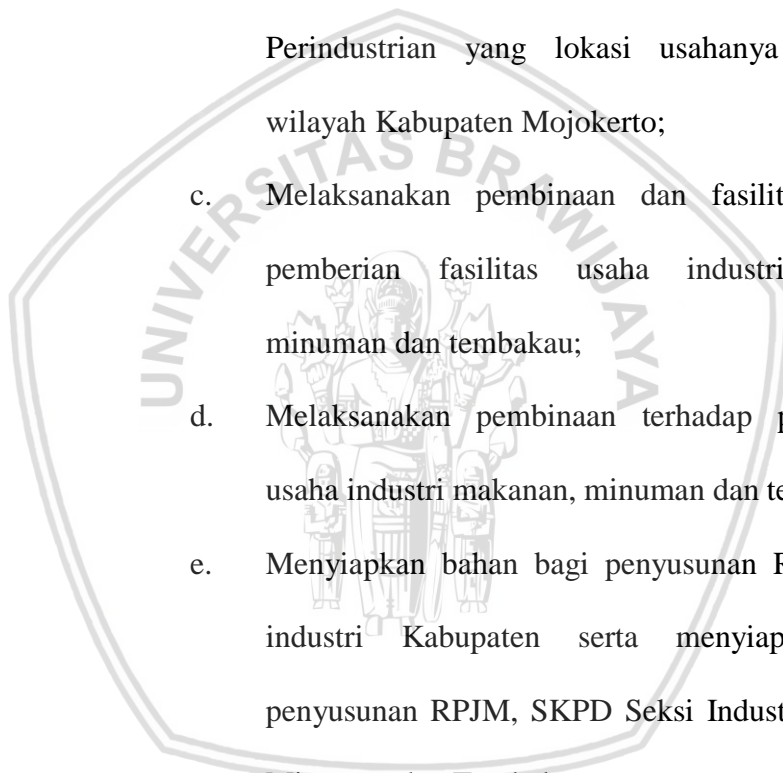
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap pemberian fasilitas usaha industri kimia hulu dan hilir;
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap perlindungan usaha industri kimia hulu dan hilir;
- e. Menyiapkan bahan bagi penyusunan RPJP bidang industri Kabupaten serta menyiapkan bahan penyusunan RPJM, SKPD Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir;
- f. Melaksanakan kegiatan promosi produk industri kimia hulu dan hilir;
- g. Melaksanakan pembinaan dan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri kimia hulu dan hilir;
- h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, HAKI, SNI dan ISO 9000 bagi usaha industri kimia hulu dan hilir;
- i. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri kimia hulu dan hilir;
- j. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi kerjasama dengan lembaga perbankan dan non perbankan bagi penambahan modal usaha industri kimia hulu dan hilir;



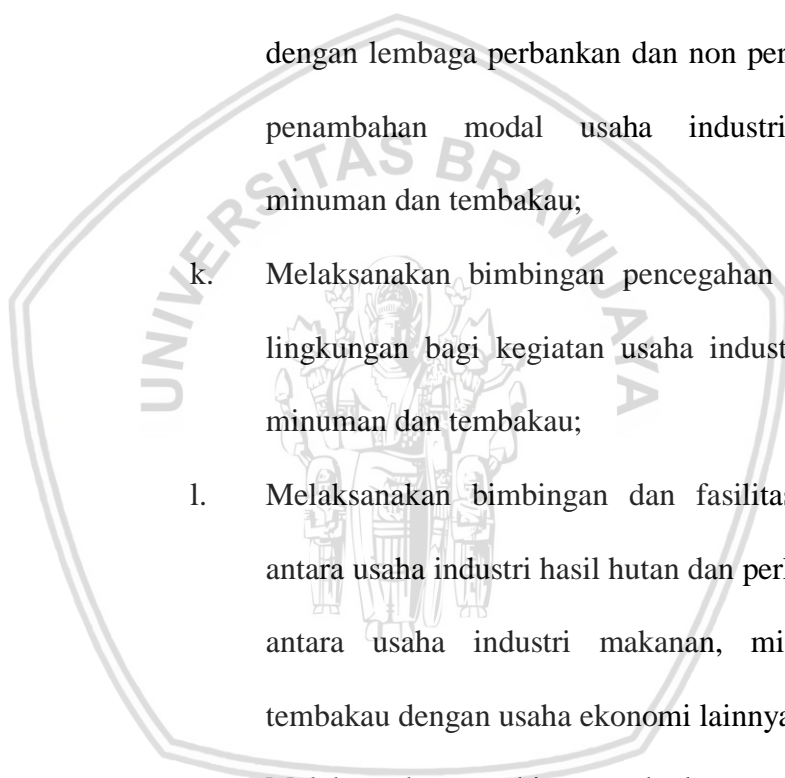
- k. Melaksanakan bimbingan pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri kimia hulu dan hilir;
- l. Melaksanakan bimbingan dan fasilitas kerjasama antara usaha industri hasil hutan dan perkebunan dan antara usaha industri kimia hulu dan hilir dengan usaha ekonomi lainnya;
- m. Melaksanakan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;
- n. Melaksanakan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri kimia hulu dan hilir;
- o. Menyusun data potensi industri hasil hutan dan perkebunan sebagai bahan informasi lintas Kabupaten, Propinsi maupun pusat;
- p. Melaksanakan pengawasan kegiatan pembangunan industri kimia hulu dan hilir;
- q. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Industri Kimia dan Agro.

Seksi Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau, mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dan kerjasama dibidang industri makanan, minuman dan tembakau;
- b. Melaksanakan pembinaan, fasilitas BAP dan rekomendasi terhadap setiap penerbitan ijin industri yang diterbitkan di Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi dan oleh Departemen Perindustrian yang lokasi usahanya berada di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap pemberian fasilitas usaha industri makanan, minuman dan tembakau;
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap perlindungan usaha industri makanan, minuman dan tembakau;
- e. Menyiapkan bahan bagi penyusunan RPJP bidang industri Kabupaten serta menyiapkan bahan penyusunan RPJM, SKPD Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
- f. Melaksanakan kegiatan promosi produk industri makanan, minuman dan tembakau;
- g. Melaksanakan pembinaan dan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri makanan, minuman dan tembakau;



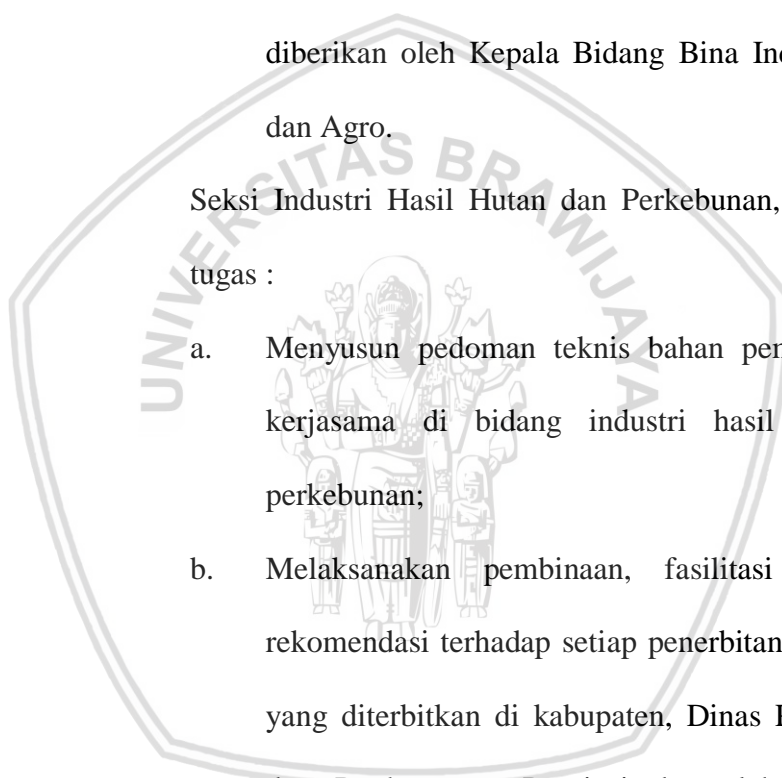
- h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, HAKI, SNI dan ISO 9000 bagi usaha industri makanan, minuman dan tembakau;
- i. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri makanan, minuman dan tembakau;
- j. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi kerjasama dengan lembaga perbankan dan non perbankan bagi penambahan modal usaha industri makanan, minuman dan tembakau;
- k. Melaksanakan bimbingan pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri makanan, minuman dan tembakau;
- l. Melaksanakan bimbingan dan fasilitas kerjasama antara usaha industri hasil hutan dan perkebunan dan antara usaha industri makanan, minuman dan tembakau dengan usaha ekonomi lainnya;
- m. Melaksanakan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;
- n. Melaksanakan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri makanan, minuman dan tembakau;



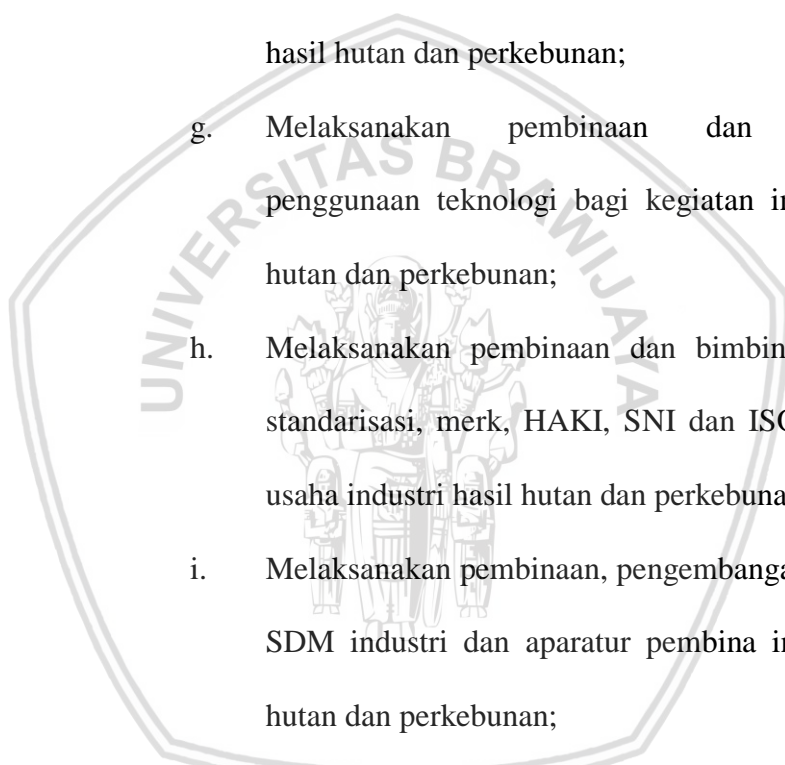
- o. Menyusun data potensi industri hasil hutan dan perkebunan sebagai bahan informasi lintas Kabupaten, Propinsi maupun pusat;
- p. Melaksanakan pengawasan kegiatan pembangunan industri makanan, minuman dan tembakau;
- q. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Industri Kimia dan Agro.

Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dan kerjasama di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- b. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi BAP dan rekomendasi terhadap setiap penerbitan ijin industri yang diterbitkan di kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi dan oleh Departemen Perindustrian yang lokasi usahanya berada di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri hasil hutan dan perkebunan;



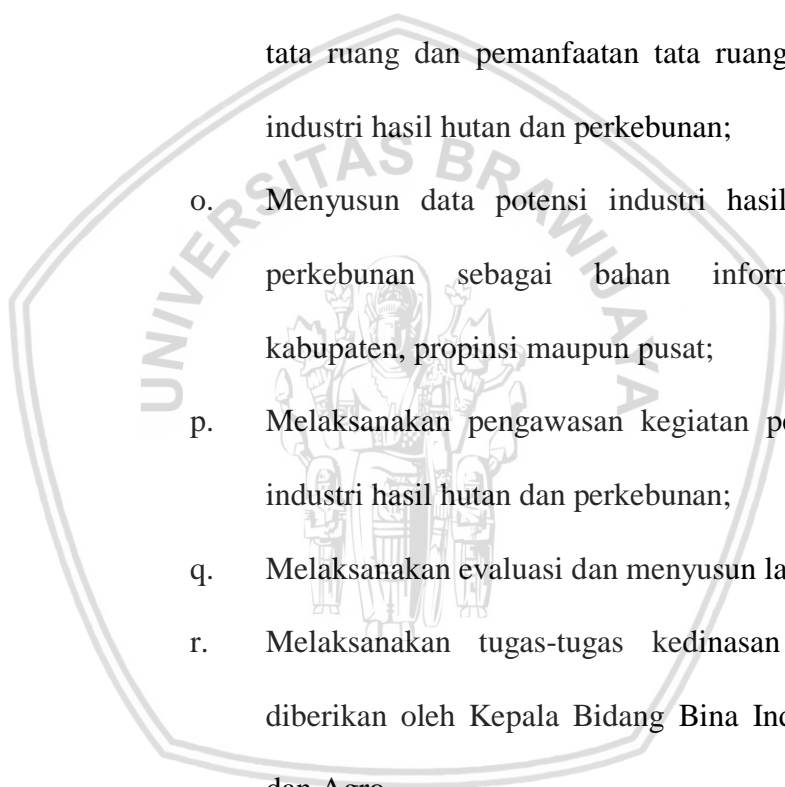
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap perlindungan usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
- e. Menyiapkan bahan bagi penyusun RPJP bidang industri kabupaten serta menyiapkan bahan penyusunan RPJM, SKPD Seksi Bimbingan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
- f. Melaksanakan kegiatan promosi produk industri hasil hutan dan perkebunan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri hasil hutan dan perkebunan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, HAKI, SNI dan ISO 9000 bagi usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
- i. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri hasil hutan dan perkebunan;
- j. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi kerjasama dengan lembaga perbankan dan non perbankan bagi penambahan modal usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
- k. Melaksanakan bimbingan pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri hasil hutan dan perkebunan;



- l. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri hasil hutan dan perkebunan dan antara usaha industri hasil hutan dan perkebunan dengan usaha ekonomi lainnya;
- m. Melaksanakan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;
- n. Melaksanakan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
- o. Menyusun data potensi industri hasil hutan dan perkebunan sebagai bahan informasi lintas kabupaten, propinsi maupun pusat;
- p. Melaksanakan pengawasan kegiatan pembangunan industri hasil hutan dan perkebunan;
- q. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Industri Kimia dan Agro.

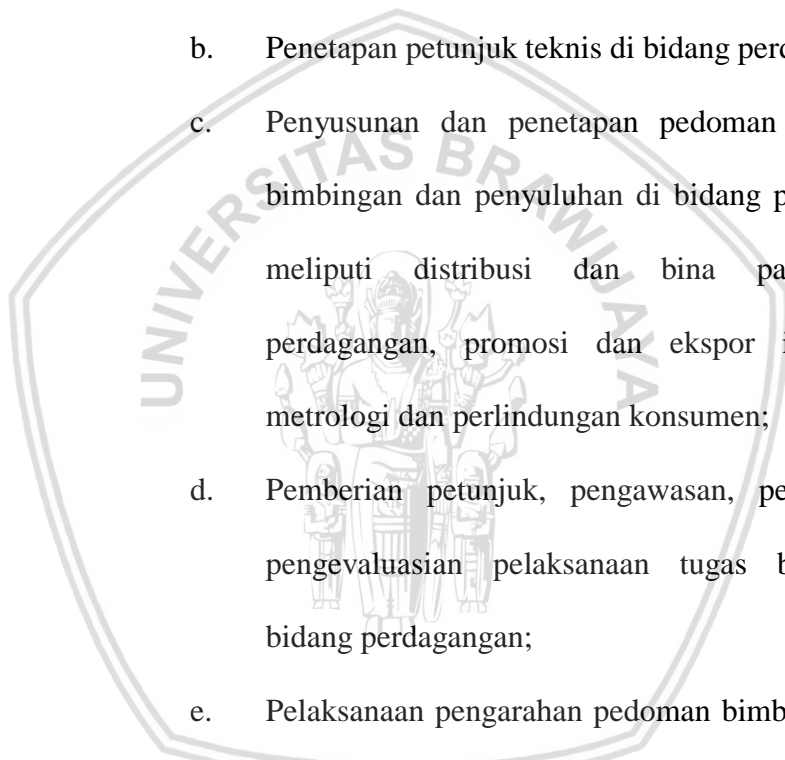
f. Bidang Bina Usaha Perdagangan

1. Bidang Bina Usaha Perdagangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi pengadaan dan penyaluran, usaha perdagangan, promosi dan ekspor impor serta metrology dan perlindungan konsumen.



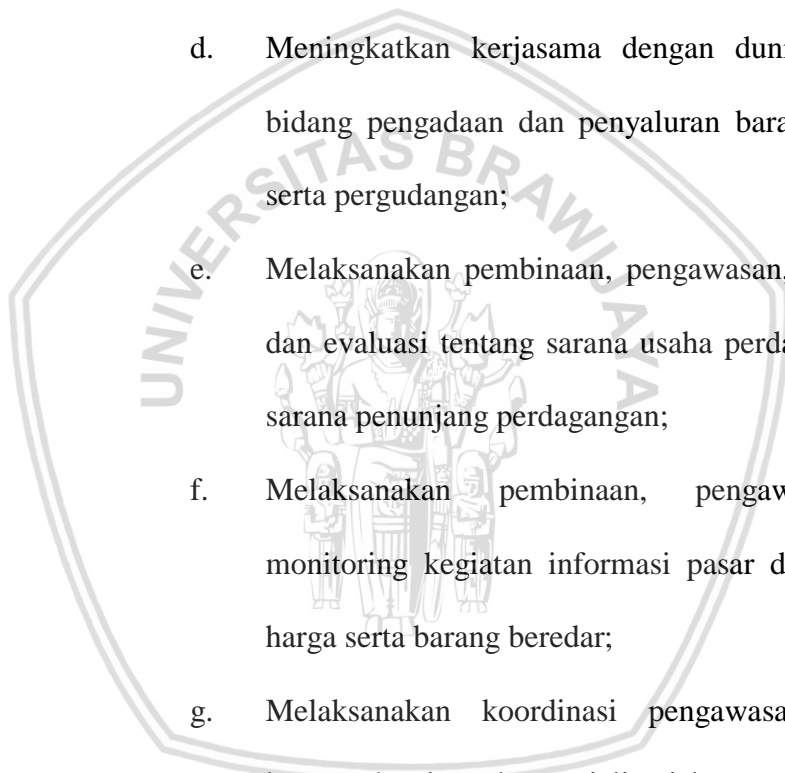
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Bidang Bina Usaha Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional bidang bina usaha perdagangan, serta mengkomunikasikan kegiatan bina usaha perdagangan secara kelembagaan baik di daerah maupun propinsi dan pemerintah pusat;
- b. Penetapan petunjuk teknis di bidang perdagangan;
- c. Penyusunan dan penetapan pedoman pembinaan, bimbingan dan penyuluhan di bidang perdagangan, meliputi distribusi dan bina pasar, usaha perdagangan, promosi dan ekspor impor serta metrologi dan perlindungan konsumen;
- d. Pemberian petunjuk, pengawasan, penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di bidang perdagangan;
- e. Pelaksanaan pengarahan pedoman bimbingan teknis setiap kegiatan operasional;
- f. Penciptaan iklim usaha perdagangan yang sehat dan mengadakan kerjasama antar pelaku usaha di bidang perdagangan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Seksi Pengadaan dan Penyaluran, mempunyai tugas :

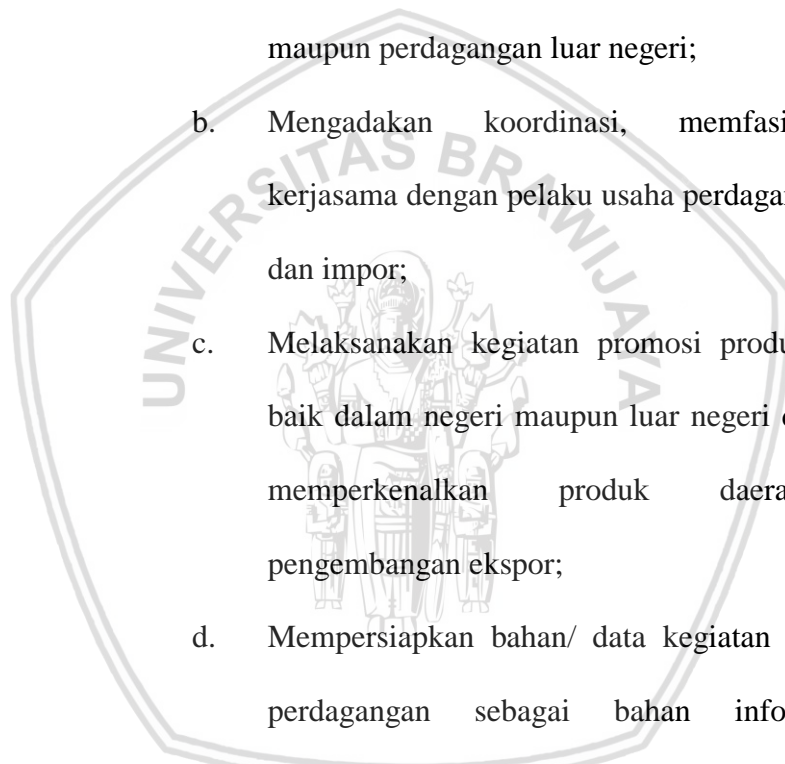
- a. Menyiapkan bahan teknis pembinaan dan bimbingan usaha perdagangan;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan;
- c. Melaksanakan monitoring tentang iklim usaha perdagangan bidang peredaran barang komoditi;
- d. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta pergudangan;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi tentang sarana usaha perdagangan dan sarana penunjang perdagangan;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan monitoring kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga serta barang beredar;
- g. Melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap barang dan jasa dan sosialisasi barang beredar dan jasa serta sosialisasi tentang barang berbahaya;
- h. Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan barang beredar;
- i. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan komoditas terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang;
- j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;



- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan.

Seksi Usaha Perdagangan, Promosi, dan Ekspor Impor, mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pembinaan dan monitoring iklim usaha perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri;
- b. Mengadakan koordinasi, memfasilitasi dan kerjasama dengan pelaku usaha perdagangan, ekspor dan impor;
- c. Melaksanakan kegiatan promosi produk unggulan baik dalam negeri maupun luar negeri dalam upaya memperkenalkan produk daerah untuk pengembangan ekspor;
- d. Mempersiapkan bahan/ data kegiatan industri dan perdagangan sebagai bahan informasi dan menggunakan sistem on-line internet ditampilkan malelui media elektronik (internet);
- e. Menyediakan bahan masukan untuk perumusan kebijakan di bidang ekspor impor, penerbitan Angka Pengenal Impor (API), penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;

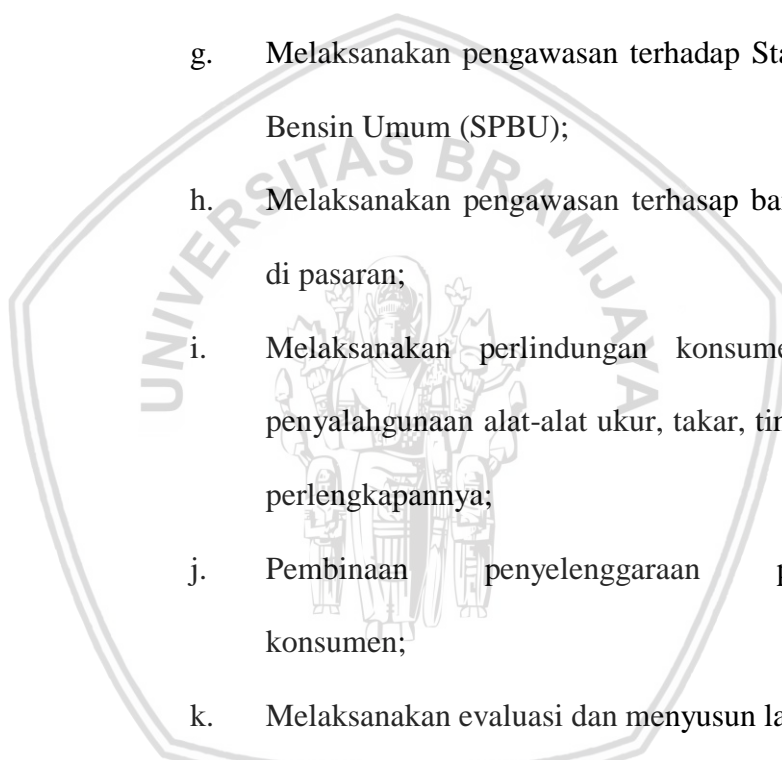


- f. Melaksanakan dan memanfaatkan hasil kerjasama internasional dan bilateral bidang ekspor impor untuk kepentingan daerah;
- g. Mengadakan monitoring dan sosialisasi tentang kebijakan ekspor impor;
- h. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, pendaftaran perusahaan dan ekspor impor;
- i. Memberikan rekomendasi usaha perdagangan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan.

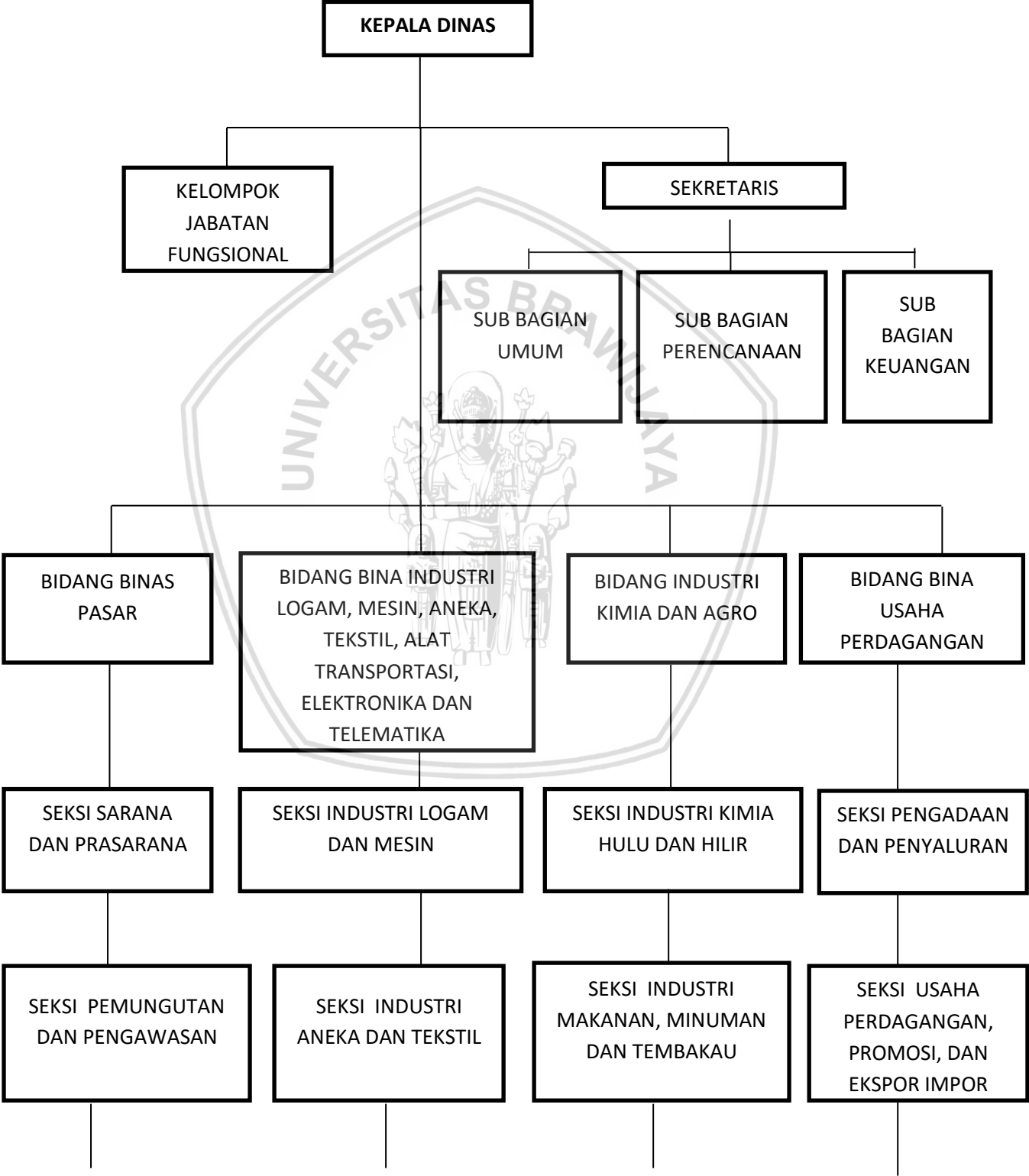
Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen, mempunyai tugas :

- a. Mengawasi penggunaan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya;
- b. Melaksanakan penyuluhan tentang kemetrologian kepada masyarakat;
- c. Melaksanakan pembinaan kepada pengusaha dan reparatur alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;

- d. Melaksanakan analisa dan alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang berkaitan dengan kemetrologian;
- e. Melaksanakan pos ukur ulang terhadap timbangan yang baru ditera-tera ulang;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU);
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap barang beredar di pasaran;
- i. Melaksanakan perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
- j. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan.



Bagan 4.2
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Mojokerto



SEKSI TATA LAKSANA	SEKSI INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTROMANIKA DAN TELEMATIKA	SEKSI INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN	SEKSI METROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
--------------------	---	---	---

Sumber: *Data Sekunder, diolah 2016*

5. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Polisi Pamong Praja memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah, dan/atau aparaturnya;

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Polisi Pamong Praja memiliki wewenang sebagai berikut:

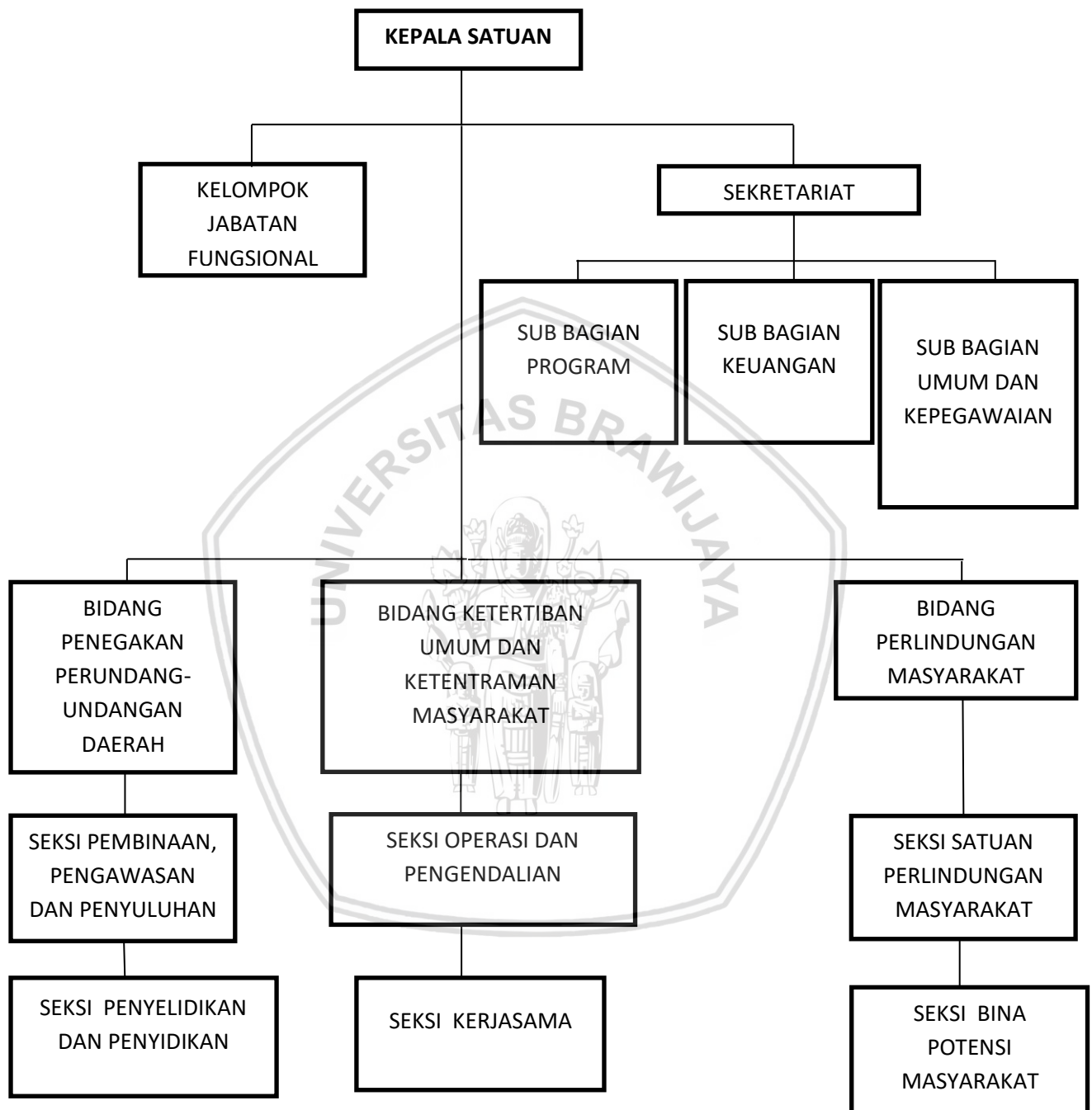
- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. Menindak warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Adapun susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu terdiri dari:

- a. Kepala Satuan, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Sekretariat, yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol yang terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan\
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketrentaman masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 4.3.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto



Sumber: *Data Sekunder, diolah 2016*

B. Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto, serta Satuan Polisi Pamong Praja terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Pemerintah Kabupaten Mojokerto selama ini melakukan pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol dari berbagai sudut. Salah satunya adalah berupa tindakan turun langsung ke lapangan. Cara ini dipandang lebih efektif karena pengendalian dan pengawasan dapat dilakukan secara langsung.

Pengendalian minuman beralkohol sebelum pembatalan Keputusan Presiden nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan upaya diantara lain:

1. Penetapan tempat penjualan minuman beralkohol;
2. Penyelenggaraan perijinan Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB);
3. Penyelenggaraan perijinan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
4. Pemungutan retribusi ijin tempat usaha penjualan minuman beralkohol.

Sejak adanya pembatalan Keputusan Presiden nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui *leading sector* Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto membentuk tim penyusunan peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol diantara lain:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto selaku ketua tim.
2. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto sebagai anggota.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto sebagai anggota.
4. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto sebagai anggota.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto sebagai anggota.
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai anggota.
7. Bagian Perekonomian Kabupaten Mojokerto.

Tim tersebut dibentuk berdasarkan unsur-unsur yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Berikut adalah unsur-unsur yang dimaksud:

1. Dinas yang tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
2. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
3. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
4. Dinas yang tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
5. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
6. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
7. Dinas terkait lainnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tunjuk sebagai *leading sector* dalam tim penyusunan peraturan daerah Kabupaten Mojokerto, karena berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati harus diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

Sejauh ini rancangan peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol telah sampai pada tahap pembahasan di tingkat DPRD Kabupaten Mojokerto. Materi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol Kabupaten Mojokerto berisi diantara lain:

1. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol berdasarkan asas:
 - a. Keamanan

- b. Kesehatan masyarakat
 - c. Ketentraman masyarakat
 - d. Ketertiban umum
 - e. Kepastian hukum
 - f. Perlindungan kepentingan umum
2. Maksud dan tujuan pengaturan, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah:
- a. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang mampu menjamin ketertiban umum, keamanan, ketentraman masyarakat, dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol.
 - b. Memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan usaha, maupun masyarakat agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah administratif Kabupaten Mojokerto.
 - c. Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha yang baik sehingga dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dapat diawasi, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat-tempat tertentu.
 - d. Menciptakan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di daerah.
3. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah:

- a. menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung dan Penjual Eceran selain TBB;
- b. menerbitkan rekomendasi bagi TBB dalam memperoleh SIUP-MB sebagai pengecer dari Gubernur;
- c. menerbitkan SIUP-MB, SITU-MB dan SKP-A;
- d. melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal daerah;
- e. melakukan penelitian lapangan dan menyusun Berita Acara Penelitian Lapangan sebagai syarat permohonan rekomendasi Gubernur bagi Distributor untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C dari Pemerintah;
- f. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan/atau penjualan secara eceran minuman beralkohol selain TBB;
- g. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol; dan
- h. kewenangan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Hak dan Kewajiban masyarakat

Hak masyarakat antara lain:

- a. hak atas keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum terhadap praktek peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto;

- b. hak atas informasi jelas, dan jujur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol; dan
- c. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas peredaran minuman beralkohol yang menimbulkan dampak negatif dan keresahan di masyarakat.

Kewajiban masyarakat antara lain:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- b. melaporkan setiap tindakan dan/atau kejadian yang ditimbulkan dari penggunaan dan/atau konsumsi minuman beralkohol yang mengancam kesehatan dan/atau keselamatan jiwa.

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha antara lain:

- a. hak atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha peredaran minuman beralkohol;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- c. hak untuk mendapatkan pelayanan atas pengurusan SITU-MB, SIUP-MB dan SKP-A;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penerbitan SITU-MB, SIUP-MB, dan SKP-A; dan

- e. hak untuk mendapat pembinaan dan sosialisasi terhadap kebijakan atas pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Kewajiban pelaku usaha antara lain:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
 - b. menjalankan perizinan usaha perdagangan dan tempat usaha perdagangan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mematuhi ketentuan mengenai penataan atas peredaran minuman beralkohol pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
6. Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol:
- a. klasifikasi minuman beralkohol;
 - b. pengendalian minuman beralkohol;
 - c. pengawasan minuman beralkohol;
 - d. TP2MB;
 - e. laporan;
 - f. larangan;
 - g. penyidikan;
 - h. penertiban;

- i. pembinaan;
- j. partisipasi masyarakat; dan
- k. ketentuan sanksi

7. Klasifikasi Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

8. Pengendalian Minuman Beralkohol melalui penyelenggaraan perizinan SITU-MB, perizinan SIUP-MB, penerbitan SKP-A dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol:

Ketentuan Perizinan Minuman Beralkohol melalui SITU-MB, antara lain:

- a. Setiap orang dan/atau badan yang melakukan penjualan atas minuman beralkohol wajib memiliki SITU-MB.

- b. SITU-MB yang dimaksud di atas diterbitkan oleh SKPD yang membidangi perizinan berdasarkan rekomendasi TP2MB.
- c. Masa berlaku SITU-MB adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- d. Persyaratan administrasi pengajuan SITU-MB disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
 2. KTP untuk perorangan dan Akte Pendirian Orang atau pengusaha untuk badan hukum;
 3. Izin gangguan (HO);
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 7. tanda lunas pembayaran PBB tahun terakhir (bagi pemohon yang merupakan wajib PBB);
 8. Jumlah dan daftar minuman yang dijual dengan kadar alkohol yang dikandung masing-masing.

Ketentuan Perizinan Minuman Beralkohol melalui SIUP-MB, antara lain:

- a. Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Setiap penjualan atas minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.
- c. SIUP-MB sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh SKPD yang membidangi perizinan berdasarkan rekomendasi TP2MB.
- d. Masa berlaku SIUP-MB adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- e. Permohonan SIUP-MB untuk penjual langsung minuman beralkohol hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan dokumen asli meliputi:
 - 1. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
 - 2. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai penjual langsung;
 - 3. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
 - 4. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 5. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB);
 - 6. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 7. fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - 8. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

9. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan; dan
10. pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar.

Ketentuan penerbitan SKP-A, antara lain:

- a. Setiap toko pengecer minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
 - b. Permohonan SKP-A sebagaimana dimaksud di atas adalah untuk *supermarket* dan *hypermarket* dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - c. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer;
 - d. fotokopi IUTM;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan; dan
 - f. pakta integritas penjualan minuman beralkohol golongan A.
9. Setiap pelayanan penerbitan SITU-MB dipungut retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
 10. Pengawasan Terhadap Penataan dan/atau Penjualan Minuman Beralkohol.
 - a. Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C untuk diminum langsung hanya diizinkan pada tempat-tempat tertentu.

- b. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud antara lain:
 - 1. hotel berbintang 1, 2, 3, 4, dan 5;
 - 2. restoran berbintang 1, 2, dan 3; dan
 - 3. bar atau rumah minum.
- c. Selain tempat-tempat tertentu sebagaimana tersebut di atas, khusus untuk minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer, berupa:
 - 1. *supermarket*; atau
 - 2. *hypermarket*.
- d. Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud harus memiliki sertifikat usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penjualan minuman beralkohol tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit pada radius 500 (lima ratus) meter.
- f. Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

11. Tata cara Penjualan Minuman Beralkohol

- a. Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.
- b. Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dilakukan terhadap orang yang telah dianggap dewasa dan/atau cakap hukum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang dibuktikan dengan Kartu Identitas dan/atau paspor yang masih berlaku.

- c. Petugas/pramuniaga wajib mencatat identitas pembeli secara lengkap sesuai dengan keterangan yang tertera di dalam kartu identitas dan/atau paspor meliputi:

1. nama lengkap;
2. tempat/tanggal lahir;
3. jenis kelamin;
4. alamat;
5. status perkawinan; dan
6. kewarganegaraan.

- d. Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud dilakukan rekapitulasi dalam bentuk laporan secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Disperindag bersamaan dengan laporan penjualan minuman beralkohol.

12. Pelaporan

- a. Pelaporan Bagi Pemegang SITU-MB dan SIUP-MB:

1. Setiap penjual langsung dan/atau pengecer baik perorangan dan/atau badan yang telah memegang SITU-MB dan SIUP-MB, wajib menyampaikan hasil laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Disperindag dengan tembusan Gubernur C.q Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:

- 2.1 Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;

- 2.2 Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;

- 2.3 Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan

- 2.4 Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.

b. Pelaporan Bagi Penerbit SITU-MB dan SIUP MB:

1. Pejabat penerbit SITU-MB dan SIUP-MB dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan penjualan minuman beralkohol kepada penjual langsung dan/atau pengecer.
2. Pejabat penerbit sebagaimana dimaksud di atas wajib menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SITU-MB dan SIUP-MB serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri C.q. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati, Gubernur, dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi.
3. Laporan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

13. Larangan

- a. Setiap orang perorangan dan/atau badan dilarang memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki izin.
- b. Setiap orang perorangan dan/atau badan dilarang menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55 % (lima puluh lima persen).
- c. Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang mengoplos, mencampur, dan membuat minuman beralkohol dan/atau minuman beralkohol tradisional dengan bahan yang mengandung racun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
- d. Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat-tempat umum.
- e. Setiap orang dan/atau badan usaha yang telah memiliki izin dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil.
- f. Setiap pemegang SITU-MB dan SIUP-MB dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SITU-MB dan SIUP-MB.

14. Penertiban

- a. Dalam hal elakukan penertiban, Bupati menunjuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai SKPD yang berwenang menegakkan Peraturan Daerah.
- b. Penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, penggunaan SITU-MB dan SIUP-MB yang tidak sesuai dengan peruntukan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan.
- c. Penertiban terhadap pelanggaran penjualan minuman beralkohol bagi setiap badan usaha yang memiliki izin dilakukan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari TP2MB.
- d. Dalam kondisi tertentu, guna menjalankan penertiban Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

15. Pembinaan

Bupati melalui SKPD yang membidangi melakukan pembinaan secara teknis dan administrasi kepada setiap orang dan/ atau badan terhadap upaya-upaya yang masih dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto. Pembinaan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang penegndalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- b. Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan/ atau sertifikasi usaha pariwisata;

- c. Pemberian pedoman teknis pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- d. Pemberian bimbingan teknis, supervise, dan konsultasi kepada setiap orang dan/ atau badan usaha dalam upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di masyarakat.

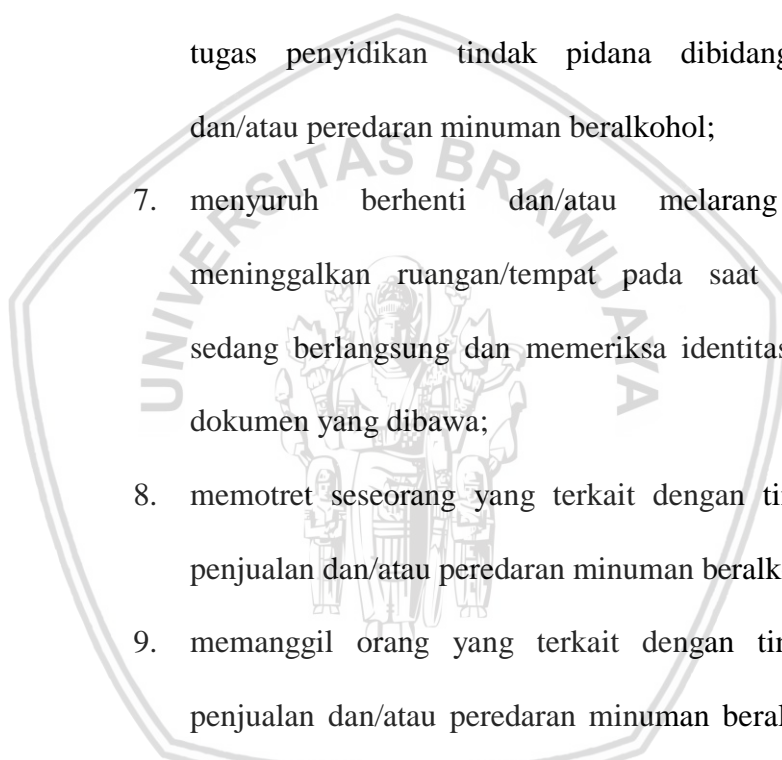
16. Partisipasi masyarakat

- a. Setiap orang dan/ atau badan usaha memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
- b. Setiap orang dan/ atau badan usaha wajib memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan adanya tindak pidana atas penjualan dan/ atau peredaran minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang.
- c. Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan pelayanan di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol masyarakat dapat menyampaikan keluhan, memberikan masukan dan/ atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang peningkatan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol baik secara lisan maupun tertulis.
- d. Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/ atau pemecahan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan penyidikan

- a. Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini dilaksanakan oleh penyidik dan/ atau penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud adalah:
 1. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 2. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol;
 3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana terkait dengan penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol;

4. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penjualan dan/ atau peredaran minuman beralkohol;
5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol;
7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan/tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
8. memotret seseorang yang terkait dengan tindak pidana penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol;
9. memanggil orang yang terkait dengan tindak pidana penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. menghentikan penyidikan; dan
11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



- d. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

18. Ketentuan Sanksi

- a. Setiap perorangan dan/ atau badan yang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi berupa:
 1. Peringatan secara lisan maupun tertulis;
 2. Pencabutan SITU-MB dan SIUP-MB;
 3. Penyegehan dan/ atau penutupan tempat usaha; dan
 4. Denda administrative
- b. Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perizinan setelah mempertimbangkan rekomendasi TP2MB.
- c. Untuk sanksi pidana, Setiap orang dan/atau badan yang menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa memiliki SITU-MB dan SIUP-MB akan dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- d. Setiap orang dan/atau badan usaha yang menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55 % akan dikenakan sanksi pidana

- kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/ denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- e. Setiap orang dan/atau badan usaha dengan sengaja mengoplos, mencampur minuman beralkohol dengan bahan yang mengandung racun atau bahan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum dan/atau fasilitas umum dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- g. Setiap orang dan/atau badan usaha dengan sengaja menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau wanita hamil dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- h. Setiap pemegang izin dan/atau keterangan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum di dalam SITU-MB dan SIUP-MB dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Adapun data izin kafe dan karaoke yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto melalui Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto periode 2010-2014, yaitu adalah sebagai berikut:



Tabel 4.2

Data Izin kafe dan karaoke yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto periode 2010-2014

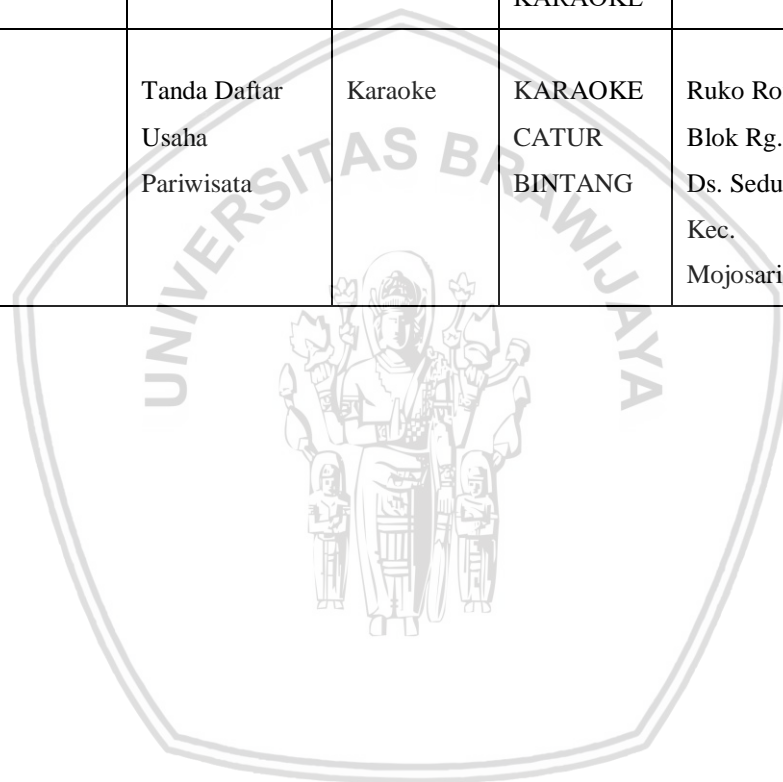
NO	NAMA	ALAMAT	NOMOR IZIN	JENIS IZIN	JENIS USAHA	NAMA USAHA	LOKASI	STATUS	TGL IZIN	TGL JATUH TEMPO	KET.
1.	KARSOKO	Kenanten RT 1, RW 4, KEC. Puri	430/ 2943/ PAR. 14/ 416-207.2/ 2010	Surat Izin Usaha Karaoke Keluarga	Hiburan 7 Rekreasi Gelanggang Seni	NIKKO FAMILY	Graha Mojopahit Boulevard Kav, 14 Kec Mojoanyar	BARU	23-12-2010	23-12-2013	MASA BERLA-KU HABIS
2.	AGUS SUHARTO	JL. I.G. VI/20 Tulungagung	430/775/PAR. 14/416-207.2.2011	Surat Izin Usaha Karaoke	Karaoke	HOTEL RAYA TRAWAS AND COTTAGES	Dsn. Slep RT09 RW 03 Ds. Ketapanrame Kec. Trawas	PERPAN-JANGAN	09-02-2011	09-02-2014	MASA BERLA-KU HABIS
3.	KASMINTO	Dsn. Sawo Ds Sawo RT 04, RW 01 Kec. Jetis	430/ 1968/PAR. 49/416207.2/2011	SK Ijin Usaha Cafe "ABANG"	Makanan Dan Minuman	CAFÉ ABANG	Dsn. Japanan Lor Ds Japanan Kec. Kemlagi	BARU	26-05-2011	26-05-2014	MASA BERLA-KU HABIS

4.	SRI WAHYUNENGSIH	Ngaglik GT rongyong Baru RT 06 RW 04 Kel Kranggan Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto	430/463/PAR 7g/416- 207.2-2012	Surat Izin Usaha Pariwisata	Hiburan 7 Rekreasi	KARAOKE “SHINTA”	Jl. By Pass Ds. Jampirogo Kec. Sooko	PERPAN- JANGAN	15-02- 2012	15-02- 2015	MASA BERLA- KU HABIS
5.	YAYUK ISTIANAH	Perum Griya Jetis Permai IV No. 3 RT 07 RW 09 Ds. Jetis Kec. Jetis	430/ 117/PAR.8d/416- 207.2/2012	Izin Usahapariwisata	Makanan Dan Minuman	CAFÉ DAN KARAOKE “DAHLIA”	Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar	BARU	16-04- 2012	16-04- 2015	SUDAH TUTUP
6.	SUTAPA	Dsn. Tegalsari RT 02 RW 01 Ds. PURI Kec. PURI	430/383/PAR.7b/416- 207.2/2012	Surat Izin Usaha Pariwisata	Huburan 7 Rekreasi Gelanggang Seni	KARAOKE “DIVA JAYA”	Ds. Trowulan Kec. Trowulan	BARU	08-02- 2012	08-02- 2015	MASA BERLA- KU HABIS

7.	MOHER	JL. KH. DAHLAN 14 RT. 03 RW. 03 Ds. Senatanan Kec. Magersari Kota Mojokerto	430/049/PAR.7g/416-207-2/2013	Surat Izin Usaha Pariwisata	Karaoke	PURI INDAH	JL. Raya By Pass KM. 25 Kenanten Puri	BARU	29-01-2013	29-01-2016	
8.	SUNTORO	JL. Salak No 48-B RT. 39 RW. 10 Desa Mojorejo Kec. Taman Kab. Madiun		TDUP Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	Karaoke	RASA RINDU	JL. Yon Joko Tole No.38 Dsn. Ngembah Ds. Ngembah Kec. Dlanggu	BARU	17-01-2014	17-01-2017	
9.	TEGUH SANTOSO	Jl. Pahlawan No. 10 RT. 5.		TANDA DAFTAR	Karaoke	KARAOKE KELUAR-	Jl. Gajahmada	BARU	25-07-2014	25-07-2017	

		RW.1 Kel. Miji Prajurit Kulon Kota Mojokerto		USAHA PARIWISATA		GA “MOJOSA- RI KARAOKE”	No. 5 Ds. Seduri Kel. Mojosari				
10.	SOERO SANTOSO	Jl. Airlangga RT. 11 RW. 03 Kel. Wonokusumo Mojosari	430	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Karaoke	KARAOKE CATUR BINTANG	Ruko Royal Blok Rg. 1 Ds. Seduri Kec. Mojosari	BARU	07-11- 2014	07-11- 2017	

Sumber: *Data Sekunder, diolah 2016*



Tabel 4.3

Daftar Karaoke di Kabupaten Mojokerto

NO.	NAMA PEMILIK	ALAMAT	NAMA USAHA	LOKASI	TGL. IZIN	TGL JATUH TEMPO
1.	SUNTORO	JL. SALAK NO. 48-B RT. 39. RW. 10 DS. MOJOREJO KEC. TAMAN MADIUN	KARAOKE “RASA RINDU”	JL. YON JOKO TOLE NO. 38 DSN NGEMBEH DS. NGEMBEH KEC. DLANGGU	17- 01- 2014	17-01- 2017
2.	TEGUH SANTOSO	JL. PAHLAWAN NO.10 RT. 5 RW. 1 KEL. MIJI PRAJURIT KULON KOTA MOJOKERTO	KARAOKE “MOJOSARI KARAOKE”	JL/ GAJAHMADA NO. 5 DS. SEDURI KEL MOJOSARI	25- 07- 2014	25-07- 2017
3.	SOERO SANTOSO	JL. AIRLANGGA RT. 11 RW. 03 KEL. WONOKUSUMO MOJOSARI	KARAOKE “CATUR BINTANG”	RUKO ROYAL BLOK RG. 1 DS. SEDURI KEC. MOJOSARI	07- 11- 2014	07-11- 2017

Sumber: Data Sekunder, diolah 2016

Pada tanggal 15 Maret 2015 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (Indonesian Hotel & Restaurant Association) Badan Pimpinan Cabang (PHRI BPC) Mojokerto mengajukan permohonan ijin usaha minuman beralkohol kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. PHRI BPC Mojokerto mengharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dapat menerbitkan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol demi kelancaran pengusaha dibawah naungan PHRI BPC Mojokerto. Karena semenjak pembatalan Keputusan Presiden nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto tidak bisa mengeluarkan Ijin Usaha Minuman Beralkohol selama belum ada Peraturan Daerah yang mengatur.

Menindaklanjuti surat permohonan tersebut, Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto selaku instansi yang berwenang untuk menerbitkan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol memiliki beberapa hal yang akan disampaikan, yakni sebagai berikut:

1. PHRI BPC Mojokerto mengajukan permohonan Ijin Usaha Minuman Beralkohol (Minol), agar memperoleh ijin dari Bapak Bupati untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, B dan C.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014, melimpahkan penerbitan SIUP MB kepada Kepala Dinas Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan.

3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Pemungutan Retribusi Ijin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol, hanya mengatur pelayanan penerbitan Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU MB).
4. Kewenangan penerbitan SITU-MB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 dimaksud, tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/ HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
5. Dengan adanya pencabutan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Jadi kesimpulannya Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum dapat memberikan pelayanan penerbitan SITU MB dengan pertimbangan:

1. Belum ada landasan hukum berupa Peraturan Daerah yang baru.
2. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perlu ditafsirkan secara detail melalui Peraturan Daerah.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 6 Tahun 2015, pelayanan penerbitan SIUP MB dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang perdagangan.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto selama ini telah melakukan pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol dari dua (2) segi, yaitu dari segi *preventif* dan juga dari segi *represif*. Pengawasan dan pengendalian dari segi *preventif* adalah berupa kegiatan sosialisasi ke masyarakat bahwa untuk sementara izin usaha perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto belum bisa diterbitkan, dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Mojokerto.

Pengendalian dan pengawasan dari segi *represif* adalah berupa kegiatan inspeksi mendadak ke kafe dan karaoke di Kabupaten Mojokerto. Bila dalam inspeksi tersebut ada pihak-pihak yang tetap melakukan peredaran minuman beralkohol dengan ilegal, maka akan ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah, berkaitan dengan pengawasan peredaran minuman beralkohol diwilayah Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto berupa inspeksi mendadak ke kafe dan karaoke di Kabupaten Mojokerto. Berikut adalah daftar kafe dan karaoke yang telah di kunjungi guna melakukan inspeksi tersebut:

1. Kafe dan karaoke rasa Rindu DTC Desa Ngembah Kecamatan Dlanggu;

2. Diva Jaya Karaoke Desa Trowulan Kecamatan Trowulan;
3. Karaoke Shinta Desa Jampirogo Kecamatan Sooko;
4. Kafe Abang Dusun Japanan Lor Desa Japanan Kecamatan Kemlagi;
5. Karaoke Puri Indah Desa Kenanten Kecamatan Puri;
6. Hotel Royal Trawas and Cottage Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas;
7. Nikko Family di Graha Mojopahit Boulevard Kav. 14 Kecamatan Mojoanyar;
8. Karaoke Catur Bintang Desa Seduri Kecamatan Mojosari; dan
9. Mojosari karaoke Desa Seduri Kecamatan Mojosari.

Dalam kegiatan inspeksi mendadak tersebut, tidak ada kafe dan/atau karaoke yang tertangkap melakukan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto. Namun jika selama Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum mempunyai Peraturan Daerah terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, kemudian terdapat pelanggaran terkait dengan hal tersebut, maka pelanggar akan diberi sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, yaitu berupa pencabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di Kabupaten Mojokerto. Jika terdapat pelanggaran atau tindak kejahatan terkait dengan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto, maka pelaku akan ditindak sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

C. Hambatan-hambatan yang dialami dalam upaya pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Penulis membagi hambatan-hambatan yang timbul dari dua segi, yakni dari segi Pemerintah dan dari segi masyarakat. Berikut merupakan hambatan-hambatan yang timbul dari segi Pemerintah, terutama yang dialami oleh Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto:

1. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto.

Hal ini merupakan hambatan yang paling besar dalam upaya pengawasan dan pengendalian izin usaha perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto. Karena dengan tidak adanya peraturan terkait yang mengatur, maka peredaran minuman beralkohol akan semakin bebas dan tidak termonitoring, sehingga akan menyulitkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya untuk melakukan pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto.

2. Belum adanya ketentuan yang mengatur secara tegas dan jelas tentang minuman beralkohol di luar kriteria golongan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat yaitu golongan A, B dan C.

Karena seperti kita ketahui, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah sendiri terkait

dengan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan kearifan budaya lokal masing-masing daerah tersebut. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, termasuk Kabupaten Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto terdapat suatu minuman keras tradisional yang seringkali dikonsumsi warga dalam acara adat istiadat. Minuman beralkohol ini disebut dengan nama cukrik. Cukrik sendiri diproduksi secara tradisional oleh warga, dengan bahan-bahan sederhana yang mudah didapat dan murah. Dengan tidak adanya peraturan yang mengatur tentang hal ini, maka pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto semakin sulit.

3. Belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas tentang bahan-bahan apa saja yang boleh dijadikan material dasar untuk membuat minuman beralkohol.

Minuman beralkohol tradisional merupakan minuman yang cukup digemari oleh masyarakat menengah kebawah. Karena minuman ini tergolong murah dan mudah didapat. Bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi minuman beralkohol juga merupakan bahan-bahan yang sering ditemui, bisa dari buah-buahan atau hasil pertanian yang mengandung karbohidrat. Namun tidak sedikit masyarakat yang menggunakan bahan-bahan tidak lazim dan membahayakan tubuh. Terkadang kadar alkohol yang terkandung didalamnya memang masih termasuk kedalam golongan A,B atau C, tetapi dikarenakan bahan-bahan yang tidak lazim tersebut maka minuman beralkohol yang diproduksi rawan menjadi berbahaya bagi tubuh.

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mojokerto, baik dari segi kualitas, maupun kuantitas.

Kurangnya Sumber Daya Manusia di Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mojokerto menyebabkan cakupan pengendalian dan pengawasan di Kabupaten Mojokerto menjadi tidak merata. Sehingga masih banyak wilayah-wilayah yang tidak tersentuh dalam aksi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mojokerto.

5. Kurangnya pengawasan di tingkat Kecamatan yang menjadi kewenangan Kepala Skasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (Kasi Trantib).

Dari segi masyarakat, penulis menemukan satu hambatan yang cukup berpengaruh, yakni kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan perijinan minuman beralkohol.

Pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Kabupaten Mojokerto seharusnya sudah memiliki Peraturan Daerah untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih dalam tahap penyusunan Peraturan Daerah mengenai minuman beralkohol. Namun, masyarakat di Kabupaten Mojokerto masih banyak yang tidak mengetahui tentang hal ini. Seharusnya tidak ada peredaran minuman beralkohol dalam bentuk apapun selama masih belum ada Peraturan Daerah terkait yang mengatur secara jelas. Masih banyak pedagang-pedagang yang melakukan penjualan minuman beralkohol di tempat usaha mereka, dengan alasan tidak mengetahui bahwa Peraturan Daerah yang lama sudah tidak berlaku.

D. Solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam upaya pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

1. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol menggunakan dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
 - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Salah satu kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah dengan melakukan pengawasan pada minimarket diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. Pengawasan ini adalah berupa kegiatan pelarangan untuk menjual minuman beralkohol dalam kadar apapun. Apabila sebelumnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 diperbolehkan menjual minuman beralkohol dengan kadar 5% di minimarket, maka dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol hal ini di larang.

2. Melakukan sosialisasi terhadap kios-kios kecil terkait dengan pelarangan penjualan minuman beralkohol selama belum ada Peraturan Daerah terkait yang mengatur secara jelas.
3. Melakukan sosialisasi tentang bahaya dan hukum terkait dengan minuman beralkohol. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
4. Menambah personil dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mojokerto.
5. Melakukan koordinasi antara Tim Kabupaten Mojokerto dengan pihak Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Muspika, Karang Taruna, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian izin usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah masing-masing yang dilakukan secara kontinyu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Sejak adanya pembatalan Keputusan Presiden nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui *leading sector* Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto membentuk tim penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Jadi kesimpulan dari rumusan masalah pertama adalah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum dapat memberikan pelayanan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SITU-MB) selama belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Mojokerto.
2. Penulis membagi hambatan yang timbul dari dua segi, yakni segi pemerintah dan segi masyarakat. Berikut adalah hambatan yang timbul dari segi pemerintah:
 - a. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Mojokerto.
 - b. Belum adanya ketentuan yang mengatur secara tegas dan jelas tentang minuman beralkohol di luar kriteria golongan yang telah ditentukan oleh

Pemerintah Pusat yaitu golongan A, B dan C, contohnya adalah minuman beralkohol oplosan, dan sebagainya.

- c. Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang bahan-bahan apa saja yang boleh digunakan dalam proses produksi minuman beralkohol.
- d. Kurangnya sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- e. Kurangnya pengawasan di tingkat Kecamatan yang menjadi kewenangan Kepala Saksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (Kasi Trantib).

Dari segi masyarakat hambatan yang timbul adalah mengenai kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan perijinan minuman beralkohol, yang selama belum ada Peraturan Daerah yang mengatur maka minuman beralkohol tidak boleh beredar dalam bentuk apapun.

3. Solusi yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mengatasi berbagai hambatan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pengendalian dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol menggunakan dasar:
 - Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- b. Melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan pelarangan penjualan minuman beralkohol selama belum ada Peraturan Daerah terkait yang mengatur secara jelas.
- c. Melakukan sosialisasi tentang bahaya dan sanksi hukum terkait dengan minuman beralkohol. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
- d. Menambah personil dan meningkatkan sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.
- e. Melakukan koordinasi antara Tim Kabupaten Mojokerto dengan pihak Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Muspika, Karang Taruna, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian izin usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah masing-masing yang dilakukan secara kontinyu.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dan pihak legislatif untuk segera bekerjasama menyusun Peraturan Daerah tentang pengaturan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol agar dapat secepatnya diterbitkan. Dikarenakan bersifat mendesak maka untuk pengawasan diharapkan masyarakat secara umum di Kabupaten Mojokerto juga dapat ikut berperan serta.
2. Terkait dengan wacama aturan terbaru terkait dengan pelarangan minuman beralkohol, maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut oleh para peneliti selajutnya.

3. Terkait dengan sejarah buruk di Kabupaten Mojokerto tentang minuman beralkohol oplosan yang telah memakan korban, maka diharapkan pihak penegak Peraturan Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan pihak kepolisian untuk menindak secara tegas, agar tidak terjadi hal serupa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Beni Ahmad Saebani, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan Kesatu, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Bachrul Amiq, **Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah**, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.

Eti Setiawati, **Bahasa Indonesia Keilmuan dalam Karya Tulis Ilmiah**, Surya Pena Gemilang, Malang, 2008.

Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati dkk, **Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya**, Elex Media Komputindo, 2009.

Johni Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Jum Anggriani, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sarlito Wirawan Sarwono, **Psikologi Remaja**, Edisi Revisi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

S.F. Marbun, **Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta, 2001.

W. Riawan Tjandra, **Hukum Keuangan Negara**, Grasindo, Jakarta, 2006.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Internet :

Jurnal Nasional, Minuman Beralkohol Pakai Label SNI (Online),

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/8338/Minuman-Alkohol-Pakai-Label-SNI> (10 November 2015).

KBBI versi *Online*, <http://kbbi.web.id/alkohol> (15 November 2015).

Tempo Nasional, **Gamawan: Keppres Dihapus, Miras Beredar Bebas**(*Online*),

<http://nasional.tempo.co/read/news/2013/07/05/078493821/gamawan-keppres-dihapus-miras-beredar-bebas> (25 November 2015).

Republika Online, **SBY Terbitkan Peraturan Presiden Miras Baru** (*Online*)

<http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/01/02/mys4qe-sby-terbitkan-Peraturan-Presiden-miras-baru> (25 November 2015).

